



LAPORAN KINERJA (LKJ)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN

2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran organisasi dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kandangan, Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



RONALDY PRANA PUTRA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19850416 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GRAFIK.....	7
DAFTAR GAMBAR	8
PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT XXX.....	10
IKHTISAR EKSEKUTIF XXX.....	11
BAB I PENDAHULUAN	14
1. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	14
1. 2 Mandat dan Peran Strategis	39
1. 3 Sistematika Laporan	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	41
2.1 Rencana Strategis.....	41
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	43
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1 Pengukuran Kinerja.....	54
3.2 Analisis Capaian Kinerja	56
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	147
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 (Matrik Tindak Lanjut 2024).....	149
3.5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja/Rencana Tindak Lanjut di Tahun 2026	151

3.6	Realisasi Anggaran	154
BAB IV PENUTUP		164
4.1	Kesimpulan Umum	164
4.2	Hambatan dan Tantangan	165

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator Kinerja Disdikbud Tahun 2025 Dalam Renstra Disdikbud Tahun 2025-2029.....	42
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025	43
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perubahan) Tahun 2025	45
Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.....	47
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	54
Tabel 3.2 Sasaran strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025	54
Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran 1 Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan	56
Tabel 3.4 Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Target Akhir RPJMD	59
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Layak dan Berkualitas.....	61
Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Layak dan Berkualitas	61
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Peserta Didik Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	76
Tabel 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Kesempatan Peserta Didik Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan.....	77
Tabel 3.9 Capaian Indikator Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	84

Tabel 3.10 Capaian Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik terhadap Target Akhir RPJMD.....	86
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan.....	91
Tabel 3.12 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan.....	92
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Peserta Didik.....	103
Tabel 3.14 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Peserta Didik.....	104
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas.....	117
Tabel 3.16 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas.....	118
Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.....	127
Tabel 3.18 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) terhadap Target Akhir RPJMD.....	128
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal .	132
Tabel 3.20 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	133
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pelaku Seni Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.....	135
Tabel 3.22 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pelaku Seni Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah	136
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Obyek Warisan Budaya	138

Tabel 3.24 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pelestarian Obyek Warisan Budaya	138
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Permuseuman	141
Tabel 3.26 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Permuseuman	142
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah	145
Tabel 3.28 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah	145
Tabel 3.29 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	148
Tabel 3.30 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024	149
Tabel 3.31 Rencana Tindak Lanjut	151
Tabel 3.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	155
Tabel 3.33 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	156

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2021 – 2025 (tahun)	49
Grafik 3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	50
Grafik 3.3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021 – 2025 (tahun)	51
Grafik 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	51
Grafik 3.5 Perkembangan AKM Pendidikan Dasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 – 2025 (Nilai)	52
Grafik 3.6 Nilai AKM Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan.....	53
Grafik 3.7 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2025	57
Grafik 3. 8 Perkembangan Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2025	85
Grafik 3.9 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan	129

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 3.1 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Tahun 2025	67
Gambar 3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sekolah Dasar Tahun 2025	68
Gambar 3.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025.....	71
Gambar 3.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025.....	72
Gambar 3.5 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD Tahun 2025	73
Gambar 3.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung PAUD Tahun 2025	75
Gambar 3.7 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Tahun 2025	76
Gambar 3.8 Kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.....	97
Gambar 3.9 Kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.....	100
Gambar 3.10 Kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	101
Gambar 3.11 Kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.....	103
Gambar 3.12 Kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Didik Sekolah Dasar	111
Gambar 3.13 Kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.....	114
Gambar 3.14 Kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Didik PAUD.....	115
Gambar 3. 15 Kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Didik PNF	116

Gambar 3.16 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD	122
Gambar 3.17 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik Dan.....	124
Gambar 3.18 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik Dan.....	125
Gambar 3.19 Kegiatan Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	134
Gambar 3.20 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Pelaku Seni Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah	137
Gambar 3.21 Kegiatan Peningkatan Pelestarian Obyek Warisan Budaya	140
Gambar 3.22 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	144
Gambar 3.23 Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan.....	147

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT
XXX**

IKHTISAR EKSEKUTIF XXX

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sembilan sasaran strategis dengan total sebelas indikator kinerja dengan sebelas target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap sebelas target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100 persen dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase Peserta Didik yang Berprestasi dengan capaian realisasi 152,84 persen;
 - b) Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan capaian realisasi 109,15 persen;
 - c) Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik dengan capaian realisasi 104,81 persen;
 - d) Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi di Masing-Masing Sekolah dengan capaian realisasi 101,83 persen;
 - e) Angka Partisipasi Sekolah dengan capaian 101,80 persen; dan
 - f) Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B dengan capaian realisasi 100,18 persen.
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100 persen
Tidak ada target dan capaian realisasi yang tepat 100 persen.
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100 persen dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik dengan capaian realisasi 99,47 persen;
 - b) Angka Melanjutkan Sekolah dengan capaian realisasi 98,11 persen;
 - c) Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah tercapai 96,28 persen;

- d) Nilai Kemampuan Literasi dengan capaian realisasi 94,53 persen; dan
- e) Nilai Kemampuan Numerasi dengan capaian realisasi 93,34 persen.

Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan	Angka Partisipasi Sekolah	90,00%	91,62%	101,80%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik	57,00%	59,74%	104,81%
3	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Layak dan Berkualitas	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik	58,25%	57,94%	99,47%
4	Meningkatnya Kesempatan Peserta Didik Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah	100%	98,11%	98,11%
5	Meningkatnya Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B	73,58%	73,71%	100,18%
6	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Kemampuan Literasi	66,00%	62,39%	94,53%
		Nilai Kemampuan Numerasi	58,50%	54,61%	93,34%
		Persentase Peserta Didik Yang Berprestasi	8,80%	13,45%	152,84%
7	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas	Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi di Masing-masing Sekolah	62,83%	63,98%	101,83%
8	Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,75 indeks	61,94 indeks	109,15%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	96,28%	96,28%

Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 347.477.398.160 atau 85,17 persen dari total pagu anggaran yang dapat digunakan yaitu Rp. 407.955.499.360.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kolaborasi internal maupun dengan pemangku kepentingan lain serta upaya inovatif sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Secara sederhana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah penggerak utama yang memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas sekaligus menjaga identitas budaya lokal tetap hidup. Tugas utama seorang Kepala Dinas adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kadisdikbud bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Utama

Untuk menjalankan tugas tersebut, seorang Kepala Dinas menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Menyusun kebijakan di tingkat daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Memastikan operasional sekolah berjalan lancar, termasuk pengadaan fasilitas dan sarana prasarana.
- 3) Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Mengawasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas, termasuk guru dan tenaga kependidikan.

- 4) Pelestarian Kebudayaan Mengelola, melindungi, dan mengembangkan aset budaya daerah, seperti museum, situs sejarah, kesenian tradisional, hingga bahasa daerah.
- 5) Evaluasi dan Pelaporan Memantau sejauh mana program pendidikan dan kebudayaan berhasil (misalnya tingkat kelulusan atau serapan anggaran) dan melaporkannya kepada pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat yaitu :

- a. Pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;

- j. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
- 3. Sub Bagian Keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependidikan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

- h. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- m. Menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b. Penyusunan program standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan

- kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
- c. Koordinasi pelaksanaan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - d. Pengawasan dan pengendalian standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - e. Evaluasi dan pelaporan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
- c. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

1) Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar.

Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;

- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan pengembangan profesi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah dan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar;
- e. Menelaah, menilai dan menindaklanjuti laporan atau hasil temuan pengawas sekolah tentang hasil pengendalian, pembinaan dan penilaian terhadap manajemen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- f. Melaksanakan pembinaan manajemen sekolah dasar;
- g. Memfasilitasi pemecahan, penggabungan dan penghapusan sekolah dasar;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemberian izin pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh swasta;
- i. Memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- j. Menyiapkan rencana kebutuhan dan mengatur pengembangan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dasar;
- k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugas.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria

dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah dasar serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- d. Melakukan inventarisasi alat pelajaran/alat bantu pengembangan kesiswaan, perpustakaan dan ruang penunjang lainnya di tingkat sekolah dasar;
- e. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana prasarana pada setiap satuan pendidikan sekolah dasar;
- f. Mendata dan mendokumentasikan sarana prasarana yang ada pada setiap satuan pendidikan sekolah dasar;
- g. Melaksanakan pengembangan baik kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- h. Menyiapkan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah dasar;
- i. Menyiapkan bahan administrasi kelengkapan pemberian bantuan sarana prasarana sekolah dasar;
- j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugas.

3) Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan sekolah dasar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan sekolah dasar serta melaksanakan pemecahan masalah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan sekolah dasar;
- c. Melaksanakan pencatatan dan penilaian buku pengawas siswa, buku pegangan guru dan buku perpustakaan dan tenaga pendidik sekolah dasar;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah dasar;
- e. Menyiapkan bahan pedoman diseminasi pembelajaran sekolah dasar;
- f. Menindaklanjuti hasil temuan pengawas sekolah dasar untuk pengendalian, pembinaan dan penilaian pelaksanaan pembelajaran sekolah dasar;
- g. Melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan sekolah dasar;
- h. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penerimaan siswa baru dan mutasi siswa sekolah dasar;
- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kesiswaan;
- j. Memfasilitasi pengembangan bidang akademik, olahraga dan pertukaran pelajar sekolah dasar;
- k. Mencatat, mendata serta mendokumentasikan prestasi siswa sekolah dasar;
- l. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembelajaran dan Kesiswaan Sekolah Dasar; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai bidang tugas.

c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan program standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- c. Koordinasi pelaksanaan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- d. Pengawasan dan pengendalian standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- e. Evaluasi dan pelaporan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- c. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

1) Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan pengembangan profesi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah dan tenaga pendidik di tingkat sekolah menengah pertama;
- e. Menelaah dan menilai dan menindaklanjuti laporan atau hasil temuan pengawas sekolah tentang hasil pengendalian,

- pembinaan, dan penilaian terhadap manajemen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
- f. Membina manajemen sekolah menengah pertama;
 - g. Memfasilitasi pemecahan, penggabungan dan penghapusan sekolah menengah pertama;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemberian izin pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh swasta;
 - i. Memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
 - j. Menyiapkan rencana kebutuhan dan mengatur pengembangan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah menengah pertama;
 - k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugas.

2) Seksi Sarana dan Prasarana sekolah Menengah Pertama

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana menengah pertama. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

- d. Melakukan inventarisasi alat pelajaran/alat bantu pengembangan kesiswaan, perpustakaan dan ruang penunjang lainnya di tingkat sekolah menengah pertama;
- e. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana prasarana pada setiap satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. Mendata dan mendokumentasikan sarana prasarana yang ada pada setiap satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. Melaksanakan pengembangan baik kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. Menyiapkan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- i. Menyiapkan bahan administrasi kelengkapan pemberian bantuan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugas.

3) Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan sekolah menengah pertama. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan sekolah menengah pertama serta melaksanakan pemecahan masalah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan sekolah menengah pertama;

- c. Melaksanakan pencatatan dan penilaian buku pengawas siswa, buku pegangan guru dan buku perpustakaan dan tenaga pendidik sekolah menengah pertama;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah menengah pertama;
- e. Menyiapkan bahan pedoman diseminasi kurikulum sekolah menengah pertama;
- f. Menindaklanjuti hasil temuan pengawas sekolah untuk pengendalian, pembinaan dan pembelajaran kesiswaan sekolah menengah pertama;
- g. Melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penerimaan siswa baru dan mutasi siswa sekolah menengah pertama;
- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kesiswaan;
- j. Memfasilitasi pengembangan bidang akademik, olahraga dan pertukaran pelajar sekolah menengah pertama;
- k. Mencatat, mendata serta mendokumentasikan prestasi siswa sekolah menengah pertama;
- l. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembelajaran dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai bidang tugas.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini

dan pendidikan non formal. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Penyusunan program standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Koordinasi pelaksanaan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Pengawasan dan pengendalian standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/organisasi profesi/ organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. Evaluasi dan pelaporan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

- a. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- c. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

1) Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan manajemen dan pengembangan profesi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Menelaah dan menilai dan menindaklanjuti laporan atau hasil temuan pengawas tentang hasil pengendalian, pembinaan dan penilaian terhadap manajemen, tenaga pendidik dan

- kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. Melaksanakan pembinaan manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - g. Memfasilitasi pemecahan, penggabungan dan penghapusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemberian izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta;
 - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemberian izin pendirian lembaga kursus;
 - j. Memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - k. Menyiapkan rencana kebutuhan dan mengatur pengembangan guru, kepala sekolah dan pengawas pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan bidang tugas.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan anak usia dini dan pendidikan pendidikan non formal. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Melakukan inventarisasi alat pelajaran/alat bantu pengembangan kesiswaan, perpustakaan dan ruang penunjang lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g. Mendata dan mendokumentasikan sarana prasarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. Melaksanakan pengembangan baik kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- i. Menyiapkan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j. Menyiapkan bahan administrasi kelengkapan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

3) Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan pendidikan non formal. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta melaksanakan pemecahan masalah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Membina dan mengembangkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembelajaran dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

e. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Obyek

Pemajuan Kebudayaan (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional), cagar budaya, permuseuman dan sejarah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah;
- b. Penyusunan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah;
- c. Pengawasan dan pengendalian program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah;
- d. Koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah;
- e. Evaluasi dan pelaporan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

1. Pamong Budaya (Seni dan Budaya)
2. Pamong Budaya (Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah)

1) Pamong Budaya (Seni dan Budaya)

Pamong Budaya (Seni dan Budaya) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kesenian rakyat dan nilai budaya daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mengolah data kesenian dan nilai-nilai budaya;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap kesenian rakyat dan nilai-nilai budaya daerah;
- c. Melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap kesenian rakyat dan nilai-nilai budaya daerah;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka mendorong, mengarahkan dan meningkatkan seni budaya;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga adat daerah;
- f. Mengusulkan calon penerima penghargaan bidang seni dan budaya;
- g. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesenian rakyat dan nilai-nilai budaya daerah;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi dan pihak terkait dalam rangka pengembangan kesenian rakyat dan nilai-nilai budaya daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Seni dan Budaya; dan
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas.

2) Pamong Budaya (Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah)

Pamong Budaya (Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan cagar budaya, pengelolaan permuseuman dan sejarah. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dalam perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data Cagar Budaya, Permuseuman, dan Sejarah;

- c. Melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan memfasilitasi kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dan pihak lain dalam perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- f. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi usul pemberian bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- g. Melaksanakan penelusuran, penelitian, serta penulisan sejarah perjuangan sebelum dan sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Melaksanakan kegiatan Napak Tilas Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah; dan
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

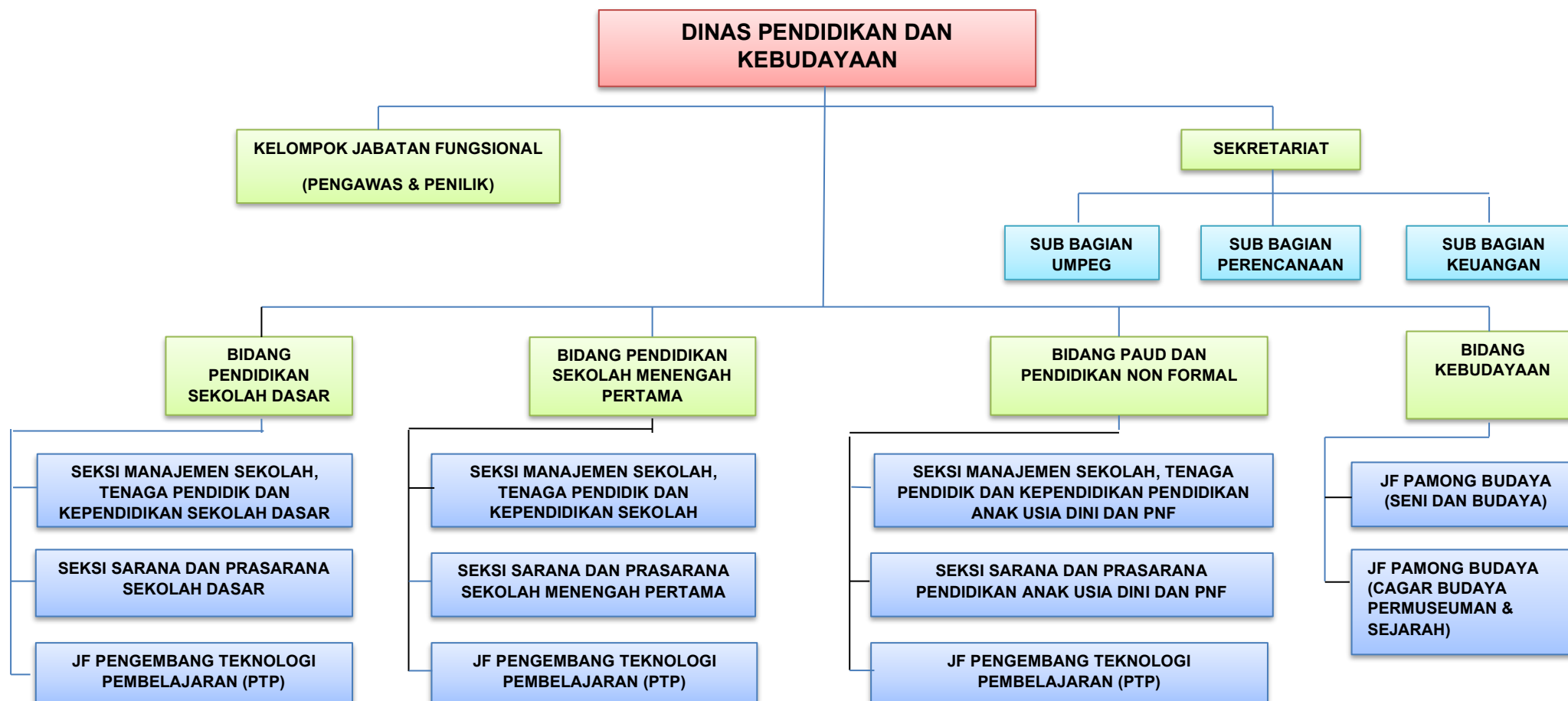
- a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas & Penilik)

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- d. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tergambar pada gambar dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



1.2 Mandat dan Peran Strategis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen penuh untuk menyukseskan visi '**Membangun Desa, Menata Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi dan Teknologi (SEMANGAT)**' melalui misi mewujudkan pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029, yang diimplementasikan melalui akselerasi tujuan Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata dengan meliputi peningkatan **Harapan Lama Sekolah (HLS)**, **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**, penguatan mutu literasi dan numerasi pada **Nilai Asesmen Nasional (AKM)**, serta internalisasi nilai-nilai karakter dan budaya melalui **Indeks Harmoni**.

Dalam mendukung visi **SEMANGAT**, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memposisikan diri sebagai **fasilitator inklusi** untuk menjamin aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, **akselerator mutu** untuk memastikan transformasi pembelajaran yang berkualitas tinggi dan berbasis teknologi, serta **dinamisator kebudayaan** yang berkomitmen penuh dalam pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah sebagai pilar utama pembentuk SDM yang unggul, berkarakter, dan agamis."

Berdasarkan tinjauan terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah serta penyelarasan dengan Visi "**Membangun Desa, Menata Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi dan Teknologi (SEMANGAT)**" dan Misi "**Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter**", maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memegang peran strategis sebagai berikut:

1. Menjamin Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan; dan
3. Meningkatkan Pembangunan Dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini fokus diberikan pada Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Mandat dan Peran Strategis, serta Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2025. Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan **strategi** atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai **strategi** ini.

Penyusunan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada hasil analisis terhadap Permasalahan, tugas dan fungsi Pelayanan Daerah. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 adalah Kesenjangan Kualitas sumber daya manusia akibat terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, Rendahnya Keterampilan tenaga kerja lokal, serta minimnya Penyelarasan Pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Tabel 2.1 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF) memadai 2. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan cukup secara kuantitas 3. Adanya dukungan orang tua/masyarakat terhadap pendidikan	1. Fasilitas dan sarana prasarana sekolah belum memadai di daerah terpencil 2. Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan belum merata 3. Angka putus sekolah masih ada, terutama di jenjang SMP	1. Percepatan dan optimalisasi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat	1. Perkembangan teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi metode pembelajaran 2. Isu kesetaraan akses pendidikan global (gender, inklusi) 3. Dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur sekolah (misal: banjir)	1. Kebijakan Merdeka Belajar (Kurikulum Merdeka) memerlukan penyesuaian di daerah 2. Kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah (kota-desi) 3. Isu toleransi dan pendidikan karakter kebangsaan	1. Rendahnya minat siswa melanjutkan ke jenjang SMA sederajat 2. Kurangnya fasilitas penunjang pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi regional (pertanian, perkebunan, perikanan)	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan secara berkelanjutan 2. Penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan global 3. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan hingga daerah terpencil

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kekayaan seni dan tradisi budaya 2. Keberadaan situs cagar budaya 3. Adanya komunitas seniman/budayawan lokal	1. Promosi dan pemasaran produk budaya lokal masih terbatas 2. Belum optimalnya pemanfaatan cagar budaya sebagai aset pendidikan dan pariwisata 3. Regenerasi seniman/pelaku budaya belum optimal	1. Pengembangan ekonomi daerah dan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat	1. Pengaruh budaya asing dan globalisasi terhadap identitas budaya lokal 2. Potensi digitalisasi untuk promosi budaya dan kesenian 3. Isu kepemilikan intelektual karya budaya	1. Kurangnya regulasi daerah yang kuat untuk pelestarian budaya 2. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang berpotensi memiliki situs budaya	1. Pengaruh budaya populer dari kota besar terhadap generasi muda 2. Terbatasnya kerja sama antar daerah dalam pengembangan dan promosi budaya	1. Revitalisasi dan regenerasi seni tradisi melalui pendidikan dan pelatihan 2. Pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi dan promosi budaya 3. Optimalisasi peran cagar budaya sebagai pusat pembelajaran dan destinasi wisata edukasi

Dalam menyusun rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berperan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yakni:

Visi: “Membangun Desa dan Menata Kota untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Semangat (Sejahtera, Mandiri, Agamis, Teknologis)”.

Misi: “Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat HSS”.

Serta Tujuan Pembangunan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 berikut:

Tujuan III: “Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan 9 Sasaran Strategis dengan 11 indikator dan target yang ingin dicapai sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator Kinerja Disdikbud Tahun 2025 Dalam Renstra Disdikbud Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,35	
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,00	
		Angka Kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	62,25	65,00	68,25	71,25	74,25	78,00	
	Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan	Angka Partisipasi Sekolah	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik	57,00	64,00	70,00	76,00	82,00	88,00	
Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni		Indeks Harmoni	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	
	Meningkatnya Kemajuan Kebudayaan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,75	59,75	61,50	64,00	68,00	72,00	

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bulan Maret Tahun 2025.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KEMUDAHAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN MENJANGKAU SEMUA KALANGAN	Angka Partisipasi Sekolah	90,00 %
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Persentase Rapor Pendidikan Dengan Nilai Baik	66,00%
3	MENINGKATNYA KEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,75 indeks
4	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%
5	MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BERKUALITAS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik	58,25%
6	MENINGKATNYA KESEMPATAN PESERTA DIDIK UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan Sekolah	100%
7	MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	73,58%
8	MENINGKATNYA KUALITAS SISWA	Nilai Kemampuan Literasi	66 skor
		Nilai Kemampuan Numerasi	58.5 skor
		Persentase Peserta Didik yang Berprestasi	8.5%
9	MERATANYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS	Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi di Masing-Masing Sekolah	62.83%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 80.408.076.477,00
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 0,00
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 4.833.284.883,00
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 1.660.936.149,00
4.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 878.490.957,00
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 292.502.204.852,00

Kandangan, 6 Maret 2025

Pihak Kedua,
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

H.SYAFRUDIN NOOR, S.E,S.Sos

H. AKHMAD SUPIAN, S.Pd

Pada Bulan Oktober 2025, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan:

1. Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Upaya pencapaian target kinerja yang sudah diperjanjikan.
2. Pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Perubahan) Tahun 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KEMUDAHAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN MENJANGKAU SEMUA KALANGAN	Angka Partisipasi Sekolah	90,00 %
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Persentase Rapor Pendidikan Dengan Nilai Baik	66,00%
3	MENINGKATNYA KEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,75 indeks
4	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%
5	MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BERKUALITAS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik	58,25%
6	MENINGKATNYA KESEMPATAN PESERTA DIDIK UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan Sekolah	100%
7	MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	73,58%

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	MENINGKATNYA KUALITAS SISWA	Nilai Kemampuan Literasi	66 skor
		Nilai Kemampuan Numerasi	58.5 skor
		Persentase Peserta Didik yang Berprestasi	8.5%
9	MERATANYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS	Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi di Masing-Masing Sekolah	62.83%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 105.943.326.649,00
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 0,00
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 4.352.218.100,00
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 102.294.400
4.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 2.960.237.465,00
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 789.567.297,00

Kandangan, 6 Maret 2025

Pihak Kedua,
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

H.SYAFRUDIN NOOR, S.E.S.Sos

RONALDY PRANA PUTRA, SSTP, M.Si

Laporan kinerja ini, diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 2.4 di atas.

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 380.282.993.318,00 namun dalam rangka efisiensi anggaran, anggaran mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.193.021.974,00 (0,31 persen) sehingga menjadi sebesar Rp. 379.089.971.344,00.

Pada Rencana Kerja dan anggaran perubahan tahun 2025, terdapat penambahan anggaran kembali sebesar Rp. 28.763.233.816,00, sehingga menjadi Rp 407.853.205.160,00.

Rincian anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025

Program/Kegiatan	RKA murni	RKA efisiensi	RKA perubahan	Ket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	292.502.204.852,00	292.217.146.156,00	293.807.855.449,00	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.769.600,00	9.769.600,00	9.769.600,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	289.699.818.706,00	289.699.818.706,00	290.574.598.310,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.161.793.246,00	867.734.550,00	1.256.863.439,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.255.300,00	861.055.300,00	1.039.056.100,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.568.000,00	778.768.000,00	927.568.000,00	-
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.408.076.477,00	81.098.709.926,00	105.943.326.849,00	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.082.311.440,00	42.659.655.275,00	61.164.550.995,00	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.471.169.300,00	20.081.005.700,00	23.867.999.203,00	-
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.939.080.785,00	11.565.353.575,00	14.103.081.275,00	-
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.915.514.952,00	6.792.695.376,00	6.807.695.376,00	-
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.833.284.883,00	3.470.030.500,00	4.352.218.100,00	-
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.550.991.383,00	2.363.199.000,00	3.342.886.600,00	-
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya	1.282.293.500,00	1.106.831.500,00	1.009.331.500,00	-

Program/Kegiatan	RKA murni	RKA efisiensi	RKA perubahan	Ket
dalam Daerah Kabupaten/Kota				
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	193.472.990,00	102.294.400,00	102.294.400,00	-
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.472.990,00	102.294.400,00	102.294.400,00	-
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.467.463.159,00	1.412.223.065,00	2.857.943.065,00	-
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.467.463.159,00	1.412.223.065,00	2.857.943.065,00	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	878.490.957,00	789.567.297,00	789.567.297,00	-
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	878.490.957,00	789.567.297,00	789.567.297,00	-
Jumlah	380.282.993.318,00	379.089.971.344,00	407.853.205.160,00	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, sebagai parameter keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang menjadi acuan dalam mengukur efektivitas program dan kegiatan selama periode 2025-2029, yaitu:

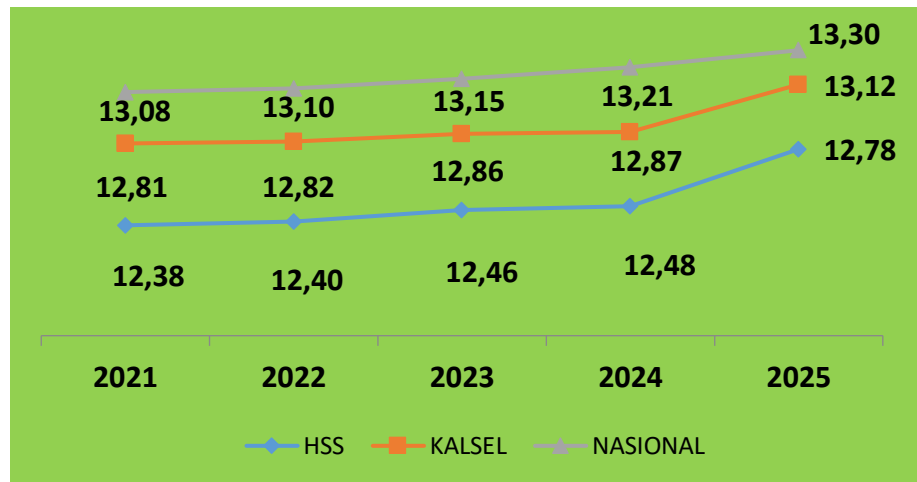
(1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) berarti lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dihitung dari penduduk yang usianya 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dimulai saat penduduk berusia 7 tahun. HLS dapat juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2025 sebesar 12,78 tahun. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 12,65 tahun dengan capaian sebesar 101,03 persen.

Pada periode 2021-2025 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan angka harapan lama sekolah (HLS) terus meningkat untuk tiap tahunnya. Pertumbuhan HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024-2025 sebesar 2,40 persen dengan kenaikan HLS sebesar 0,30 tahun.

Grafik 3.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2021 – 2025 (tahun)



Secara umum pencapaian HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami peningkatan namun masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2025 nilai HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 12,78 tahun, ini mengandung arti bahwa penduduk usia 7 tahun pada tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai harapan untuk bersekolah hingga 12,78 tahun lamanya atau bersekolah mencapai lulus kelas tiga SMA Sederajat atau duduk dibangku kuliah/universitas pada semester 2.

**Grafik 3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025**

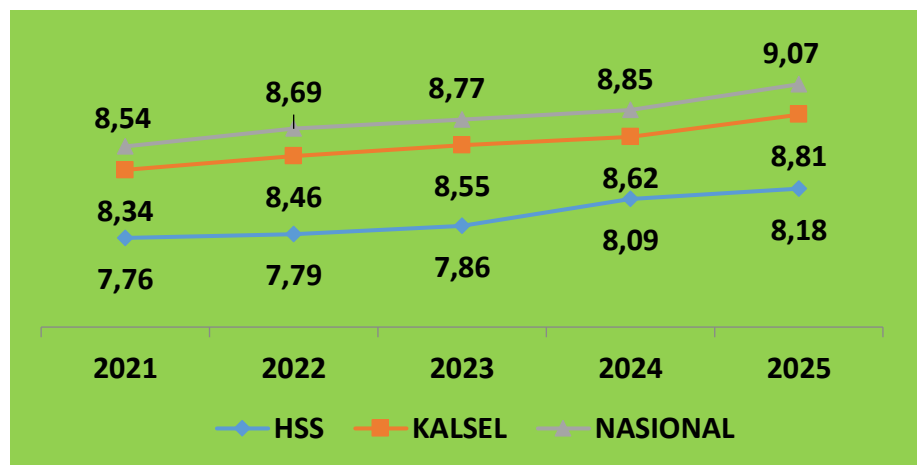


(2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasikan tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. RLS dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Dengan konsep ini, RLS lebih banyak memberi gambaran tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar aktif di pasar kerja.

Perkembangan RLS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 3.3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021 – 2025 (tahun)



Secara umum rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan (8,81 tahun) dan Nasional (9,07 tahun). Dari tahun 2021 meski perlahan tapi pasti mulai menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2024 menembus angka delapan tahun dimana tahun 2025 RLS sebesar 8,18 tahun yang artinya secara rata rata lamanya sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya sekitar delapan tahun atau hingga kelas dua SMP Sederajat atau berhenti sebelum menyelesaikan kelas 3 SMP Sederajat. Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 8,25 Tahun dengan capaian sebesar 99,15 persen.

Grafik 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025



(3) Angka Kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])

Capaian nilai AKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan rata-rata skor literasi dan numerasi peserta didik pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP Sederajat) menunjukkan dinamika yang positif dengan tren pertumbuhan yang konsisten hingga tahun 2024, sebelum mengalami koreksi tipis di tahun 2025 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

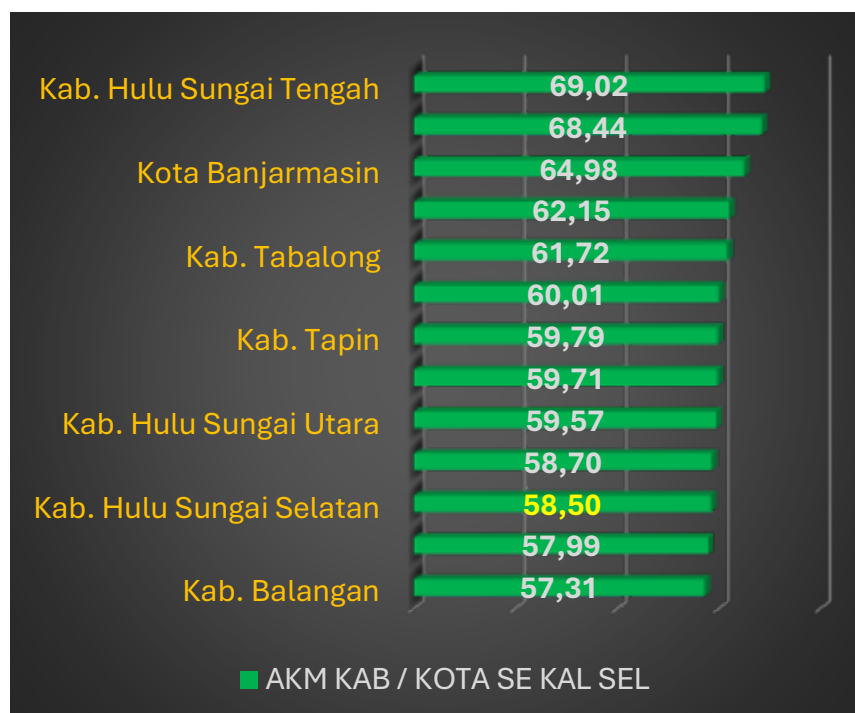
**Grafik 3.5 Perkembangan AKM Pendidikan Dasar
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 – 2025 (Nilai)**



Pada tahun 2021, nilai rata-rata dimulai pada angka 48,09. Angka ini menjadi titik awal (*baseline*) di tengah tantangan pemulihan pasca-pandemi. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan sebesar 4,19 poin menjadi 52,28. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa intervensi pendidikan dan adaptasi model pembelajaran mulai membuahkan hasil yang terukur pada kemampuan dasar peserta didik. Tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan skor 55,72. Meskipun kenaikannya tidak sebesar tahun sebelumnya, stabilitas kualitas tetap terjaga. Lonjakan kembali terjadi pada tahun 2024, di mana nilai mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 59,86. Pada fase ini, sinergi antara literasi dan numerasi mencapai titik optimal, mencerminkan keberhasilan penguatan kurikulum di tingkat pendidikan dasar.

Setelah mencapai puncak di tahun 2024, nilai AKM pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 58,50. Penurunan sebesar 1,36 poin ini merupakan hal yang wajar dalam siklus asesmen nasional. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perluasan cakupan peserta asesmen ke wilayah yang lebih terpencil, perubahan standar soal, atau fluktuasi dalam proses adaptasi metode pengajaran baru di tingkat sekolah, realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 62,25 dengan capaian sebesar 93,98 persen. Adapun nilai AKM ini tidak dapat dibandingkan dengan data provinsi dikarenakan perbedaan kewenangan dengan pemerintah Kab/Kota.

Grafik 3.6 Nilai AKM Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan



3.1 Pengukuran Kinerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan Pengukuran Kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2025, Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1.	$\leq 91\% - 100\%$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 104,76 persen yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sasaran strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan	Angka Partisipasi Sekolah	90,00%	91,62%	101,80%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik	57,00%	59,74%	104,81%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
3	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Layak dan Berkualitas	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik	58,25%	57,94%	99,47%
4	Meningkatnya Kesempatan Peserta Didik Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah	100%	98,11%	98,11%
5	Meningkatnya Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B	73,58%	73,71%	100,18%
6	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Kemampuan Literasi	66,00%	62,39%	94,53%
		Nilai Kemampuan Numerasi	58,50%	54,61%	93,34%
		Persentase Peserta Didik Yang Berprestasi	8,80%	13,45%	152,84%
7	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas	Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi di Masing-masing Sekolah	62,83%	63,98%	101,83%
8	Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,75 indeks	61,94 indeks	109,15%
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	96,28%	96,28%
Rata – rata capaian					104,76%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target; dan
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 5 target.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta target dan capaian realisasi dirinci sebagai berikut:

SASARAN I **Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama guna mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang inklusif. Sasaran ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan baik geografis, ekonomi, maupun sosial sehingga seluruh anak usia sekolah di Bumi Antaludin memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas.

a. Analisis Realisasi dan Target Kinerja

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**. Angka ini menjadi cerminan nyata sejauh mana sistem pendidikan mampu menyerap penduduk usia sekolah pada jenjang yang sesuai. Melalui peningkatan APS, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal, memperkecil kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dengan wilayah terpencil (seperti kawasan pegunungan Loksado maupun perairan Daha), serta menjamin keberlanjutan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah.

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

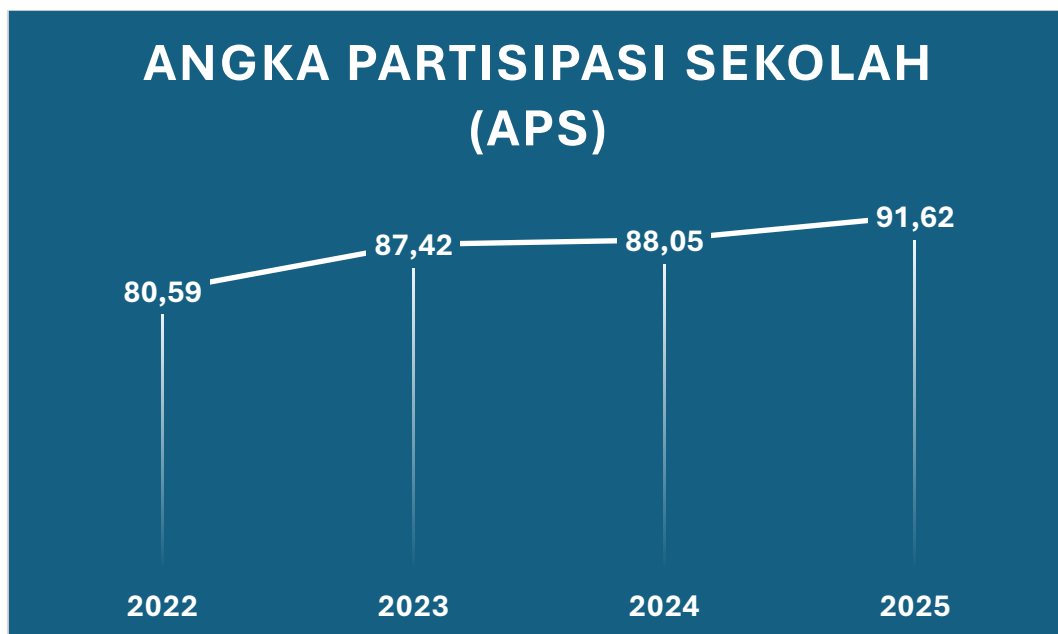
Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran 1 Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan

No	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Sekolah (Persen)	90,00	91,62	101,80%

Secara umum, capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun berjalan menunjukkan performa yang sangat impresif dengan capaian realisasi sebesar 101,80 persen. Dengan realisasi target spesifik 91,62 persen melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,00 persen, berdasarkan kategori kinerja organisasi, capaian ini tetap diklasifikasikan dalam predikat **"Baik/Sangat Tinggi"**. Angka ini merefleksikan bahwa upaya perluasan akses pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan efektif dan sudah sangat mendekati sasaran utama pemerataan layanan pendidikan.

b. Analisis Realisasi terhadap Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

**Grafik 3.7 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2025**



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sejak tahun 2022 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar 91,62 persen. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan tipis pada capaian APS kelompok usia 5-6 tahun sebesar 0,68 persen yaitu dari 98,68 persen menjadi 98,00 persen, serta pada APS kelompok usia 7-12 tahun dari 99,89 persen menjadi 99,15 persen. Meskipun secara statistik pada kelompok usia dini mengalami penurunan tipis, data faktual terbaru mencatat bahwa seluruh anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap mengenyam pendidikan anak usia dini, sehingga penurunan angka

tersebut cenderung disebabkan oleh dinamika basis data atau perbedaan metodologi pendataan kependudukan dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk kelompok usia 5-6 tahun. Pada jenjang ini mencatatkan capaian 98,00 persen (Predikat: Sangat Tinggi). pada tahun 2025 dari sebelumnya 98,68 pada tahun 2024. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,68 persen. Namun capaian ini tetap menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 5-6 Tahun di Hulu Sungai Selatan telah terakomodasi dalam sistem pendidikan PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung penuh program 1 (satu) tahun pra sekolah yang digaungkan oleh pemerintah pusat.

Pada jenjang Pendidikan Dasar (Usia 7-12 Tahun), Pada jenjang ini juga terjadi penurunan namun tidak signifikan dengan nilai mencapai 99,15 persen (Predikat: Sangat Tinggi) pada tahun 2025 dari sebelumnya 99,89 pada tahun 2024. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,74 persen. Namun capaian ini tetap menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Hulu Sungai Selatan telah terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Hal ini mempertegas keberhasilan daerah dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar secara menyeluruh.

Namun demikian, pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama (Usia 13-15 Tahun) menunjukkan progres yang menggembirakan dengan peningkatan sebesar 3,36 persen, dari 88,89 persen pada tahun 2024 menjadi 92,25 persen pada tahun ini (Predikat: Sangat Tinggi). Pencapaian ini mengindikasikan bahwa hambatan transisi dari pendidikan dasar ke menengah telah berhasil dimitigasi dengan sangat baik melalui kebijakan daerah yang tepat sasaran. Kenaikan yang melampaui angka 90 persen ini mencerminkan efektivitas program penguatan akses di tingkat kecamatan, baik melalui optimalisasi daya tampung sekolah maupun program bantuan pendidikan yang mampu menekan angka putus sekolah pada usia transisi remaja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Di sisi lain, upaya penyediaan jalur alternatif melalui Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 Tahun) menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Walaupun secara angka absolut masih berada di level 77,08 persen (Predikat: Tinggi), dengan tren positif terlihat dengan kenaikan sebesar 12,33 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen pendidikan non-formal (Paket A, B, dan C) di Hulu Sungai Selatan dikelola dengan manajemen yang lebih progresif dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Kenaikan ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah tetap berkomitmen

memberikan kesempatan kedua bagi warga masyarakat yang berada di luar jalur pendidikan formal demi menjamin hak pendidikan bagi semua kalangan.

c. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Jangka Menengah (RPJMD)

Tabel 3.4 Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2030
Angka Partisipasi Sekolah (Persen)	N/A	80,59	87,42	88,05	91,62	90,00	100

Realisasi APS tahun 2025 sebesar 91,62 persen menunjukkan adanya selisih atau deviasi sebesar 8,38 persen terhadap target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yakin dapat menuju target jangka menengah dengan akselerasi kebijakan yang lebih intensif di sisa periode perencanaan.

d. Analisis Realisasi terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lain dan Nasional

Perlu menjadi catatan penting dalam interpretasi data bahwa capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 91,62 persen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan nilai rata-rata komposit yang merepresentasikan gabungan dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD usia 5-6 tahun hingga Pendidikan Kesetaraan.

Oleh karena itu, angka ini tidak dapat dibandingkan secara langsung (*apple-to-apple*) dengan capaian APS di tingkat kabupaten/kota lain, tingkat provinsi, maupun nasional.

e. Analisis Faktor Pendorong/Penghambat Kinerja serta Alternatif Solusi

Capaian APS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 91,62 persen. Hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam mempertahankan tingkat partisipasi sekolah. Deviasi sebesar 8,38 persen terhadap target akhir RPJMD sebesar 100 persen menuntut adanya identifikasi yang presisi terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja.

Penurunan statistik yang tipis pada tahun 2025 teridentifikasi bukan sebagai dampak dari penurunan minat sekolah secara riil, melainkan didominasi oleh kendala teknis pada kelompok usia tertentu yang memerlukan sinkronisasi data lebih lanjut.

Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan faktor pendorong yang sempat membawa kinerja ke titik tertinggi, faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya anomali data di tahun berjalan, serta langkah-langkah alternatif yang ditempuh untuk memastikan akselerasi pencapaian target di sisa periode perencanaan.

Faktor Penghambat:

- Penurunan APS dari 98,68 persen menjadi 98,00 persen yang disinyalir karena ketidaksinkronan basis data kependudukan dengan laporan satuan pendidikan (Dapodik/EMIS), mengingat secara faktual seluruh anak usia tersebut telah bersekolah.
- Adanya sedikit pergeseran partisipasi pada kelompok usia wajib belajar dasar dari 99,89 persen menjadi 99,15 persen.

Alternatif Solusi:

- Melaksanakan rekonsiliasi data terpadu antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Menertibkan administrasi bagi seluruh satuan pendidikan dalam menginput data peserta didik pada sistem Data Pokok Pendidikan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan akumulasi dari efektivitas berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Layak dan Berkualitas

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh lingkungan belajarnya. Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar pemenuhan angka fisik, melainkan upaya fundamental untuk menghadirkan keadilan akses dan kenyamanan bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui infrastruktur yang layak, kita sedang membangun fondasi bagi generasi emas yang kompetitif. Dengan fasilitas yang berkualitas, motivasi

belajar siswa meningkat dan angka putus sekolah dapat ditekan. Guru dapat mengajar dengan lebih inovatif karena didukung oleh fasilitas yang mumpuni, yang pada akhirnya meningkatkan akreditasi sekolah-sekolah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Layak dan Berkualitas

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik	58,25	57,94	99,47	37.682.360.225	37.219.519.776	98,77

Realisasi indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 mencapai 57,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar 58,25 persen. Secara manajerial, tingkat capaian kinerja ini berada pada kategori Sangat Tinggi, yaitu mencapai 99,47 persen. Angka tersebut mencerminkan bahwa meskipun terdapat deviasi minor sebesar 0,31 persen, upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang representatif telah berjalan sangat efektif dan hampir mendekati sasaran sempurna sesuai perencanaan tahunan.

Keberhasilan dalam mendekati target ini didorong oleh efektivitas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan baik itu pembangunan baru maupun rehabilitasi sarana prasarana pendukung melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fokus intervensi pada perbaikan sarana prasarana yang mengalami kerusakan berat dan sedang di berbagai satuan pendidikan telah berhasil meningkatkan standar kelayakan fisik sekolah secara signifikan. Keberhasilan ini juga didukung oleh ketepatan waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh peserta didik di seluruh wilayah Bumi Antaludin. Adapun capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Layak dan Berkualitas

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan SD Baru	100	100	100	11.041.073.000	10.958.375.895	99,25
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan SD Kondisi Tidak Baik yang Diperbaiki	100	100	100	10.810.900.000	10.729.805.421	99,25
Sub Kegiatan							
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Dasar yang Dibangun (Unit)	35	35	100	7.687.302.000	7.637.800.376	99,36
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SD yang Diadakan (Buah)	2.720	2.720	100	1.314.650.000	1.309.210.000	99,59
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Dibangun (Ruang)	N/A	N/A	N/A	82.050.000	81.137.500	98,89
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SD yang Diadakan (Buah)	28.090	28.090	100	1.920.021.000	1.893.590.419	98,62
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dasar yang Dibangun (Ruang)	N/A	N/A	N/A	37.050.000	36.637.600	98,89
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang Diperbaiki (Ruang)	N/A	N/A	N/A	102.050.000	101.550.400	99,51
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Kelas SD yang Diperbaiki	120	120	100	10.708.850.000	10.628.255.021	99,25

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kelas Sekolah							
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Baru	100	100	100	3.907.616.400	3.879.328.580	99,28
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Kondisi Tidak Baik yang Diperbaiki	100	100	100	7.183.240.000	6.955.086.000	96,82
Sub Kegiatan							
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Menengah Pertama yang Dibangun (Unit)	5	5	100	1.398.700.000	1.398.271.266	99,97
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP yang Diadakan (Buah)	5	5	100	225.000.000	223.443.000	99,31
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SMP yang Diadakan (Buku)	10.360	10.360	100	261.486.400	256.983.500	98,28
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMP yang Diadakan (Buah)	1.540	1.540	100	775.000.000	774.999.948	100
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah Menengah Pertama yang Dibangun (Ruang)	1	1	100	794.920.000	793.169.473	99,78
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas SMP yang	1	1	100	452.510.000	432.461.393	95,57

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Dibangun (Ruang)						
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna SMP yang Diperbaiki (Ruang)	1	1	100	2.155.090.000	2.085.475.053	96,77
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Menengah Pertama yang Diperbaiki (Unit)	13	13	100	2.365.100.000	2.273.176.211	96,11
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama yang Diperbaiki (Ruang)	2	2	100	455.250.000	410.644.189	90,20
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah Menengah Pertama yang Diperbaiki (Ruang)	6	6	100	1.704.600.000	1.687.995.628	99,03
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SMP yang Diperbaiki (Ruang)	15	15	100	2.155.090.000	2.085.475.053	96,77
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Baru	100	100	100	2.978.810.825	2.949.454.141	99,01
	Persentase Sarana dan Prasarana PAUD Kondisi Tidak Baik yang Diperbaiki	100	100	100	1.509.290.000	1.499.376.196	99,34
Sub Kegiatan							
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana Utilitas Sekolah PAUD	7	7	100	1.381.442.000	1.364.202.553	98,75

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	yang Dibangun (Unit)						
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang Dibangun (Ruang)	2	2	100	427.260.000	424.602.040	99,38
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Diadakan (Buah)	207	207	100	449.961.000	443.699.548	98,61
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Infrastruktur TIK PAUD yang Diadakan (Buah)	75	75	100	720.147.825	716.950.000	99,56
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang Diperbaiki (Ruang)	9	9	100	1.509.290.000	1.499.376.196	99,34
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan PNF Baru	100	100	100	251.430.000	248.093.543	98,67
Sub Kegiatan							
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana Prasarana Utilitas Sekolah PNF yang Dibangun (Unit)	1	1	100	251.430.000	248.093.543	98,67

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar menunjukkan fokus yang kuat pada pemenuhan fasilitas belajar dan pendukungnya. Seluruh indikator output fisik pada sub-kegiatan di jenjang ini berhasil mencapai realisasi 100 persen. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SD baru menunjukkan kinerja yang sangat presisi dengan capaian target fisik sempurna sebesar 100 persen dan penyerapan anggaran yang sangat tinggi

mencapai 99,25 persen atau Rp. 10.958.375.895 dari target Rp. 11.041.073.000. Keberhasilan ini mencerminkan sinkronisasi yang sangat kuat antara perencanaan teknis dan realisasi keuangan di lapangan, memastikan pembangunan infrastruktur baru berjalan tepat waktu dan tepat biaya sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Begitu juga dengan perbaikan sarana dan prasarana SD yang dalam kondisi tidak baik juga mencatatkan keberhasilan maksimal dengan target fisik yang terealisasi penuh sebesar 100 persen. Dengan tingkat penyerapan anggaran yang identik sebesar 99,25 persen Rp. 10.729.805.421 dari target Rp. 10.810.900.000, ini membuktikan efektivitas manajemen pemeliharaan infrastruktur pendidikan, di mana alokasi dana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk memulihkan fasilitas belajar mengajar agar kembali dalam kondisi layak pakai secara total. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Sub kegiatan ini menunjukkan performa yang sangat presisi dengan tercapainya target pembangunan 35 unit utilitas secara penuh 100 persen. Penyerapan anggaran yang mencapai 99,36 persen Rp. 7.637.800.376 dari Rp. 7.687.302.000 mengindikasikan bahwa perencanaan biaya pembangunan sangat akurat dan pelaksanaan fisik di lapangan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar, anggaran pada sub kegiatan ini digunakan untuk Tahap Perencanaan Teknis atau penyusunan dokumen *Detailed Engineering Design* (DED). Sub kegiatan ini mencatatkan realisasi keuangan yang sangat tinggi yaitu 98,89 persen yaitu Rp. 81.137.500 dari target Rp. 82.050.000.
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, anggaran pada sub kegiatan ini juga digunakan untuk Tahap Perencanaan Teknis atau penyusunan dokumen *Detailed Engineering Design* (DED) dengan realisasi anggaran yang sangat stabil di angka 98,89 persen atau Rp. 36.637.600 dari Rp. 37.050.000.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, anggaran pada sub kegiatan terealisasi sebesar 99,15 persen atau Rp. 101.550.400

dari target Rp. 102.050.000 dan digunakan untuk Tahap Perencanaan Teknis atau penyusunan dokumen *Detailed Engineering Design* (DED).

- Rehabilitasi dilakukan pada ruang kelas dengan kondisi tidak baik untuk dikembalikan fungsinya menjadi ruang belajar yang layak. Sebanyak 120 ruang kelas telah direhabilitasi dengan capaian 100 persen dan realisasi anggaran sebesar 99,25 persen atau Rp. 10.628.255.021 dari target Rp. 10.708.850.000. Keberhasilan rehabilitasi ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran daerah dalam meningkatkan persentase gedung sekolah ber kondisi baik.

Gambar 3.1 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Tahun 2025





- Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 2.720 buah mebel (meja, kursi, dan lemari) telah didistribusikan dengan realisasi anggaran 99,59 persen dari pagu Rp. 1.314.650.000. Langkah ini merupakan upaya masif untuk memastikan tidak ada lagi peserta didik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belajar dengan fasilitas mebel yang rusak atau tidak layak.
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebanyak 28.090 buah alat peraga telah tuntas dilaksanakan dengan realisasi anggaran 98,62 persen atau Rp. 1.893.590.419 dari target Rp. 1.920.021.000. Hal ini bertujuan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang menuntut pembelajaran lebih interaktif dan kontekstual, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan bantuan visualisasi yang memadai.

Gambar 3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sekolah Dasar Tahun 2025





2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan performa yang sangat solid dengan realisasi fisik seluruh sub kegiatan mencapai 100 persen. Strategi pada jenjang ini berfokus pada keseimbangan antara perluasan daya tampung/pembangunan baru dan pemulihan fungsi fasilitas atau rehabilitasi. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Baru menunjukkan performa yang sangat akurat dengan capaian target fisik sempurna sebesar 100 persen dan penyerapan anggaran yang sangat tinggi mencapai 99,28 persen atau Rp. 3.879.328.580 dari target Rp. 3.907.616.400.

Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Kondisi Tidak Baik mencatatkan keberhasilan maksimal dengan target fisik yang terealisasi penuh sebesar 100 persen. Dengan penyerapan anggaran sebesar 96,82 persen/Rp. 6.955.086.000 dari target Rp. 7.183.240.000, ini membuktikan efektivitas manajemen pemeliharaan infrastruktur, di mana seluruh fasilitas yang direncanakan berhasil diperbaiki menjadi kondisi baik dengan

menyisakan sedikit efisiensi anggaran sebesar 3,18 Persen. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 5 unit diantaranya pembangunan pagar, paving, dan toilet untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini mencapai 99,97 persen atau Rp. 1.398.271.266.
- Pembangunan Laboratorium sebanyak 1 ruang guna mendukung penguatan literasi sains dan praktikum peserta didik Sekolah Menengah Pertama. Pembangunan ini merealisasikan anggaran sebesar 99,78 persen atau Rp. 793.169.473 dari target Rp. 794.920.000.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 1 ruang telah selesai dilaksanakan untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan anggaran sub kegiatan ini terealisasi sebesar 95,57 persen/Rp. 432.461.393 dari target Rp. 452.510.000.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula sebanyak 1 ruang dengan realisasi anggaran sebanyak 96,77 persen atau Rp. 2.085.475.053 dari target Rp. 2.155.090.000 untuk meningkatkan fasilitas sekolah.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 13 unit diantaranya yaitu pagar, halaman, dan toilet dengan realisasi anggaran 96,11 persen atau Rp. 2.273.176.211 dari target Rp. 2.365.100.000 untuk memastikan fungsi penunjang kegiatan dan operasional sekolah tetap optimal.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah sebanyak 2 ruang perpustakaan, untuk sub kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar dengan hanya merealisasikan anggaran sebesar 90,20 persen atau Rp. 410.644.189 dari target Rp. 455.250.000.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium sebanyak 6 ruang laboratorium dengan realisasi anggaran sebesar 99,03 persen atau Rp. 1.687.995.628 dari pagu Rp. 1.704.600.000 untuk kenyamanan peserta didik dalam melaksanakan praktik di sekolah.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebanyak 15 ruang dari kondisi tidak baik menjadi kondisi mantap. Ini merupakan kontributor

terbesar dalam upaya menjaga kualitas gedung sekolah secara agregat. Sedangkan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebanyak 96,77 persen atau Rp. 2.085.475.053 dari pagu Rp. 2.155.090.000.

Gambar 3.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025



- Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 5 paket dengan realisasi anggaran sebesar 99,31 persen atau Rp. 223.443.000 dari pagu Rp. 225.000.000 untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan mebel yang layak.
- Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik, sebanyak 10.360 buku teks dan non-teks dengan realisasi anggaran 98,28 persen atau Rp. 256.983.500 dari target Rp. 261.486.400 telah didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk menjamin ketersediaan referensi belajar bagi peserta didik sesuai kurikulum terbaru.
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebanyak 1.540 buah dengan realisasi keuangan sempurna 100 persen yaitu Rp. 774.999.948, memastikan peserta didik Sekolah Menengah Pertama di Hulu Sungai

Selatan memiliki akses ke peralatan pendukung pembelajaran yang modern.

Gambar 3.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025



3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan perhatian besar pada fase fondasi pendidikan melalui penguatan sarana prasarana PAUD. Seluruh indikator output fisik pada jenjang ini mencapai realisasi 100 persen dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat stabil di angka rata-rata 99,21 persen. Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Baru mencatatkan kinerja yang sangat solid dengan tercapainya target fisik 100 persen. Penyerapan anggaran sebesar 99,01 persen atau Rp. 2.949.454.141 dari pagu Rp. 2.978.810.825 menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan sarana baru telah dieksekusi dengan tingkat akurasi yang tinggi, memastikan infrastruktur pendidikan bagi anak usia dini tersedia sesuai rencana tanpa sisa anggaran yang mengendap signifikan.

Perbaikan Sarana dan Prasarana PAUD Kondisi Tidak Baik juga berhasil memenuhi target fisik secara sempurna 100 persen. Dengan

penyerapan anggaran mencapai 99,34 persen atau Rp. 1.499.376.196 dari Rp. 1.509.290.000, ini menunjukkan efektivitas manajemen pemeliharaan aset, di mana dana yang dialokasikan hampir terserap sepenuhnya untuk memulihkan kondisi ruang belajar agar kembali layak dan aman bagi peserta didik. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebanyak 7 unit difokuskan pada penyediaan lingkungan sekolah yang ramah anak dan aman dengan realisasi anggaran sebesar 98,75 persen yaitu Rp. 1.364.202.553 dari target Rp. 1.381.442.000.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 2 Ruang dengan realisasi sebesar 99,38 persen atau Rp. 424.602.040 dari pagu Rp. 427.260.000. Penambahan RKB ini sangat krusial untuk memperluas daya tampung satuan PAUD.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sebanyak 9 ruang kelas yang mengalami kerusakan telah diperbaiki secara total dengan realisasi anggaran 99,34 persen yaitu Rp. 1.499.376.196 dari target Rp. 1.509.290.000. Rehabilitasi ini memastikan bahwa anak-anak usia dini belajar di ruangan yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga estetik dan menyenangkan.

Gambar 3.5 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD Tahun 2025



- Pengadaan Perlengkapan PAUD dilakukan dengan pengadaan 75 unit laptop. Hal ini membuktikan bahwa PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai bertransformasi menuju pengenalan teknologi digital sejak dini, sekaligus mempermudah tenaga pendidik dalam mengelola administrasi serta media pembelajaran interaktif. Sub kegiatan ini

merealisasikan anggaran sebesar 99,56 persen atau Rp. 716.950.000 dari target Rp. 720.147.825.

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD sebanyak 207 buah telah tuntas dilaksanakan dengan realisasi anggaran 98,61 persen yaitu Rp. 443.699.548 dari pagu Rp. 449.961.000. APE yang berkualitas merupakan instrumen utama dalam menstimulasi perkembangan kognitif, motorik, dan sosial emosional anak didik di Bumi Antaludin.

Gambar 3.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung PAUD Tahun 2025



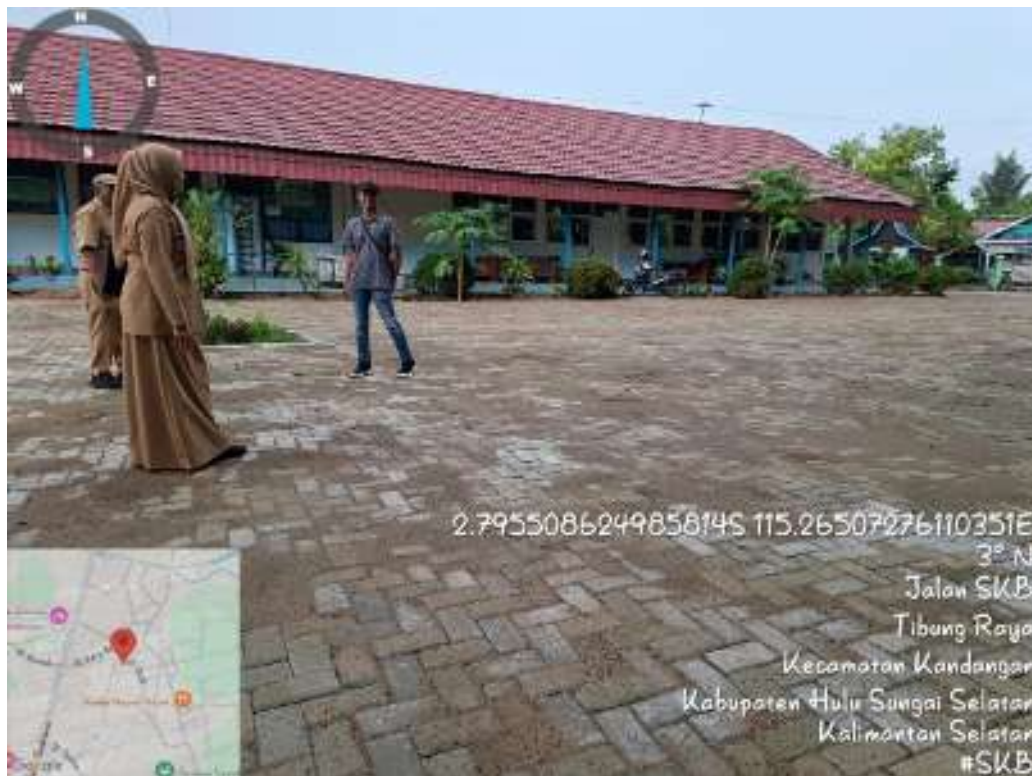
4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Meskipun dialokasikan dalam skala yang lebih kecil dibandingkan pendidikan formal, jenjang Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan tetap dikelola secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan pengadaan sarana dan prasarana baru pada jenjang Pendidikan Non Formal (PNF)/Kesetaraan mencatatkan kinerja yang sangat efektif dengan capaian target fisik yang terealisasi sepenuhnya 100 persen. Keberhasilan ini didukung oleh penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan akurat sebesar 98,67 persen atau Rp. 248.093.543 dari pagu Rp. 251.430.000, yang mencerminkan ketepatan dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur serta efisiensi dalam proses pengadaan fasilitas penunjang bagi masyarakat yang menempuh jalur pendidikan kesetaraan. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal sebanyak 1 unit difokuskan pada peningkatan fasilitas halaman Sanggar

Kegiatan Belajar (SKB). Fasilitas ini didesain untuk memberikan ruang belajar yang layak bagi masyarakat yang menempuh pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini adalah 98,67 persen atau Rp. 248.093.543 dari pagu Rp. 251.430.000.

Gambar 3.7 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Tahun 2025



2. Meningkatnya Kesempatan Peserta Didik Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan

Sebagai komitmen tertinggi dalam upaya menghapus sekat-sekat hambatan akses pendidikan, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Sasaran ini menjadi manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki hak yang setara untuk tumbuh dan berkembang melalui jalur pendidikan yang bermutu. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Peserta Didik Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah	100	98,11	98,11	32.251.574.771	12.396.424.150	38,44

Indikator Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) merupakan parameter kunci untuk mengukur efektivitas transisi peserta didik antar jenjang pendidikan misalnya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Pada periode ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan target ambisius sebesar 100 persen dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 98,11 persen.

Realisasi sebesar 98,11 persen dikategorikan sebagai capaian Sangat Tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta didik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lulus pada jenjang sebelumnya berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Gap sebesar 1,89 persen merupakan tantangan residu yang bersifat kasuistik, namun secara sistemik, layanan pendidikan di Hulu Sungai Selatan telah mampu menjaga keberlanjutan masa studi sebagian besar generasi mudanya. Adapun Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung sasaran dan indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatkan Kesempatan Peserta Didik Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik Miskin SD yang Bersekolah	100	100	100	22.785.567.495	7.188.360.000	31,55
	Jumlah Peserta Didik SD Berprestasi yang Menerima Beasiswa Pendidikan (Peserta Didik)	156	138	88,46	85.250.000	75.250.000	88,27
Sub Kegiatan							
Penyediaan Pendidik	Rasio Guru SD Terhadap	0,04	0,1	250	3.992.500.000	3.497.500.000	87,60

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Murid Per Kelas Rata Rata di Daerah Dengan Akses Sulit Terjangkau (Nilai)						
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Miskin SD yang Menerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	45	0	0	18.793.067.495	3.690.860.000	19,64
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik Miskin SMP yang Bersekolah	100	100	100	4.345.340.000	869.309.350	20,01
	Jumlah Peserta Didik SMP Berprestasi yang Menerima Beasiswa Pendidikan (Peserta Didik)	238	229	96,22	210.700.000	194.450.000	92,29
Sub Kegiatan							
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Guru SMP Terhadap Murid Per Kelas Rata Rata di Daerah Dengan Akses Sulit Terjangkau (Nilai)	0,06	0,06	100	978.000.000	724.500.000	74,08
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Miskin SMP yang Menerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	640	0	0	3.367.340.000	144.809.350	4,30
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peserta Didik	100	100	100	1.968.000.000	1.789.000.000	90,90

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Anak Usia Dini (PAUD)	Miskin PAUD yang Bersekolah						
	Jumlah Peserta Didik PAUD Berprestasi yang Menerima Beasiswa Pendidikan (Peserta Didik)	84	60	71,43	61.300.000	50.900.000	83,03
Sub Kegiatan							
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rasio Guru PAUD Terhadap Murid Per Kelas Rata Rata di Daerah Dengan Akses Sulit Terjangkau (Nilai)	0,11	0,11	100	1.968.000.000	1.789.000.000	90,90
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kese taraan	Persentase Peserta Didik Miskin PNF yang Bersekolah	100	100	100	2.795.417.276	2.192.504.800	78,43
Sub Kegiatan							
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/K esetaraan	Jumlah Peserta Didik Miskin PNF yang Mendapatkan Bantuan Besasiswa Pendidikan	1724	1285	74,54	161.108.638	154.002.400	95,59
	Jumlah Peserta Didik Miskin PNF yang Mendapatkan Bantuan Finansial	70	70	100			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Rasio Guru PNF Terhadap Murid Per Kelas Rata Rata di Daerah Dengan Akses Sulit	0,05	0,05	100	2.473.200.000	1.884.500.000	76,20

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Nonformal/K esetaraan	Terjangkau (Nilai)						

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar menunjukkan efisiensi tinggi pada Persentase Peserta Didik Miskin SD yang Bersekolah yang berhasil mencapai target 100 persen meskipun hanya menyerap 31,55 persen anggaran yaitu Rp. 7.188.360.000 dari pagu Rp. 22.785.567.495, sementara Jumlah Peserta Didik SD Berprestasi yang Menerima Beasiswa Pendidikan mencatatkan capaian yang proporsional sebesar 88,46 persen dengan penyerapan dana 88,27 persen atau Rp. 75.250.000 dari pagu Rp. 85.250.000. Fenomena ini mengindikasikan keberhasilan yang sangat kuat dalam pemerataan akses pendidikan bagi kelompok rentan dengan biaya yang sangat hemat, namun di sisi lain menunjukkan perlunya sinkronisasi perencanaan yang lebih akurat pada pemberian beasiswa agar target jumlah peserta didik berprestasi dapat terpenuhi secara maksimal selaras dengan ketersediaan pagu anggarannya. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan ini menunjukkan performa yang sangat impresif dengan capaian kinerja fisik mencapai 250 persen, dimana rasio guru terhadap murid berhasil ditingkatkan dari target 0,04 menjadi 0,1. Keberhasilan yang melampaui ekspektasi ini didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup efisien sebesar 87,60 persen/Rp. 3.497.500.000 dari target Rp. 3.992.500.000, menandakan bahwa alokasi dana telah dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran untuk memperkuat distribusi tenaga kependidikan di wilayah dengan akses sulit.
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik belum mencapai target fisik dengan capaian 0 persen meskipun telah menyerap anggaran sebesar 19,64 persen atau setara Rp. 3.690.860.000 dari total pagu 18.793.067.495. Realisasi ini digunakan untuk belanja mobil dinas kantor.

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan keberhasilan akses peserta didik miskin yang mencapai target 100 persen dengan efisiensi anggaran masif sebesar 20,01 persen atau Rp. 869.309.350 dari total pagu Rp. 4.345.340.000, di sisi lain beasiswa prestasi menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan tepat sasaran dengan realisasi fisik mencapai 96,22 persen serta penyerapan anggaran yang proporsional sebesar 92,29 persen/Rp. 194.450.000 dari pagu Rp. 210.700.000, mencerminkan sinergi yang baik antara perencanaan biaya per unit dan keberhasilan administratif dalam menyalurkan apresiasi bagi siswa berprestasi. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah upaya menjaga rasio guru terhadap murid di wilayah dengan akses sulit berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100 persen pada rasio 0,06. Keberhasilan distribusi tenaga pendidik ini didukung oleh penyerapan anggaran yang efisien sebesar 74,08 persen yaitu Rp. 724.500.000 dari pagu Rp. 978.000.000, ini menunjukkan bahwa program berjalan tepat sasaran tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi dana, sehingga menciptakan sisa anggaran yang dapat dioptimalkan untuk kebutuhan lainnya.
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik belum dapat merealisasikan bantuan fisik dengan target 640 peserta didik, sub kegiatan ini telah menyerap anggaran sebesar 4,30 persen atau setara Rp. 144.809.350 dari pagu Rp. 3.367.340.000. Anggaran ini digunakan untuk appraisal tanah SMKN 2 Kandangan.

3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menunjukkan hasil yang sangat positif pada akses peserta didik miskin dengan capaian target fisik sempurna sebesar 100 persen yang didukung oleh penyerapan anggaran yang optimal yakni 90,90 persen/Rp. 1.789.000.000 dari nilai pagu Rp. 1.968.000.000, namun pada beasiswa prestasi kinerjanya masih belum maksimal karena hanya mencapai 71,43

persen dari target jumlah peserta didik meskipun anggarannya telah terserap cukup tinggi sebesar 83,03 persen yaitu Rp. 50.900.000 dari nilai pagu Rp. 61.300.000. Kondisi ini mengisyaratkan keberhasilan yang solid dalam pemerataan akses pendidikan usia dini bagi kelompok rentan, sementara untuk beasiswa prestasi diperlukan evaluasi terkait kriteria seleksi atau perencanaan biaya agar jumlah penerima manfaat dapat dimaksimalkan selaras dengan tingkat penyerapan anggarannya. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD di daerah dengan akses sulit terjangkau mencatatkan kinerja yang sangat efektif dengan keberhasilan mencapai target rasio guru sebesar 100 persen (0,11). Capaian fisik yang sempurna ini didukung oleh penyerapan anggaran yang optimal dan proporsional sebesar 90,90 persen atau senilai Rp. 1.789.000.000 dari total pagu Rp. 1.968.000.000, yang menunjukkan manajemen distribusi tenaga kependidikan telah berjalan tepat sasaran serta efisien dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini di wilayah terpencil.

4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan mencatatkan keberhasilan target fisik yang sempurna sebesar 100 persen dalam memastikan akses pendidikan bagi peserta didik miskin, yang didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup efisien sebesar 78,43 persen atau senilai Rp. 2.192.504.800 dari total pagu Rp. 2.795.417.276. Hal ini menunjukkan bahwa program kesetaraan telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran dengan pengelolaan anggaran yang hemat, mencerminkan komitmen kuat dalam pemerataan akses pendidikan non-formal bagi masyarakat rentan tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi dana yang tersedia. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan menunjukkan hasil yang beragam, di mana penyaluran bantuan finansial bagi peserta didik miskin berhasil mencapai target penuh 100 persen, namun pemberian beasiswa pendidikan baru terealisasi sebesar 74,54

persen atau sebanyak 1.285 dari target 1.724 peserta didik. Meskipun jumlah penerima beasiswa belum maksimal, penyerapan anggaran untuk program ini tergolong sangat tinggi mencapai 95,59 persen atau Rp. 154.002.400 dari pagu Rp. 161.108.638.

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PNF di daerah dengan akses sulit terjangkau pada jenjang pendidikan nonformal berhasil mencapai target kinerja secara sempurna 100 persen dengan rasio guru terhadap murid yang terjaga di angka 0,05. Capaian ini direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang efisien sebesar 76,20% atau senilai Rp. 1.884.500.000 dari pagu Rp. 2.473.200.000, menunjukkan keberhasilan manajemen distribusi SDM kependidikan yang efektif dan ekonomis dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan kesetaraan di wilayah terpencil.

SASARAN II

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempatkan sektor pendidikan sebagai pilar utama dalam akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus instrumen vital untuk memutus rantai kemiskinan. Paradigma pembangunan pendidikan di daerah tidak lagi sekadar berfokus pada perluasan akses fisik, melainkan telah bertransformasi secara fundamental menuju penguatan aspek mutu pendidikan yang substansial dan berkelanjutan.

Komitmen strategis ini dijabarkan melalui tiga arah kebijakan utama yang saling berintegrasi. Pertama, **Meningkatnya Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan**, yang diupayakan melalui penguatan Lembaga serta standardisasi sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar agar selaras dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kedua, **Meningkatnya Kualitas Peserta Didik**, yang dipacu melalui pemenuhan alat peraga edukatif serta apresiasi terhadap capaian prestasi peserta didik guna mencetak generasi yang kompetitif. Ketiga, **Meningkatnya Pemerataan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas**, sebagai upaya memastikan bahwa distribusi kompetensi instruksional menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah dengan akses tersulit.

Melalui integrasi ketiga pilar tersebut, analisis berikut akan memaparkan sejauh mana efektivitas program dan penyerapan anggaran telah berkontribusi secara nyata dalam menghadirkan ekosistem pendidikan yang lebih unggul bagi seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan.

a. Analisis Realisasi dan Target Kinerja

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik. Indikator ini diposisikan sebagai "Standard Emas" karena tidak hanya memotret hasil belajar peserta didik secara kognitif, namun juga merefleksikan kualitas proses instruksional, iklim satuan pendidikan, serta kompetensi literasi dan numerasi secara komprehensif melalui platform Rapor Pendidikan.

Pencapaian indikator ini merupakan muara dari seluruh intervensi strategis yang telah dilakukan. Keberhasilan pembangunan fisik dan rehabilitasi ruang kelas, penyediaan alat peraga edukatif yang masif, serta pemerataan tenaga pendidik hingga ke wilayah sulit terjangkau, sejatinya adalah instrumen pendukung (*enabler*) untuk mendorong satuan pendidikan keluar dari kategori "Cukup" atau "Perlu Intervensi" menuju kategori "**Baik**".

Dengan meningkatnya jumlah sekolah yang meraih predikat "**Baik**" pada Rapor Pendidikan, hal ini membuktikan bahwa transformasi pendidikan di Hulu Sungai Selatan telah menyentuh substansi terdalam, yakni terciptanya ekosistem belajar yang berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan peserta didik. Analisis data berikut akan menjabarkan bagaimana sinergi antara dukungan anggaran dan efektivitas program di lapangan secara linier berkontribusi pada peningkatan nilai rapor satuan pendidikan di seluruh jenjang.

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

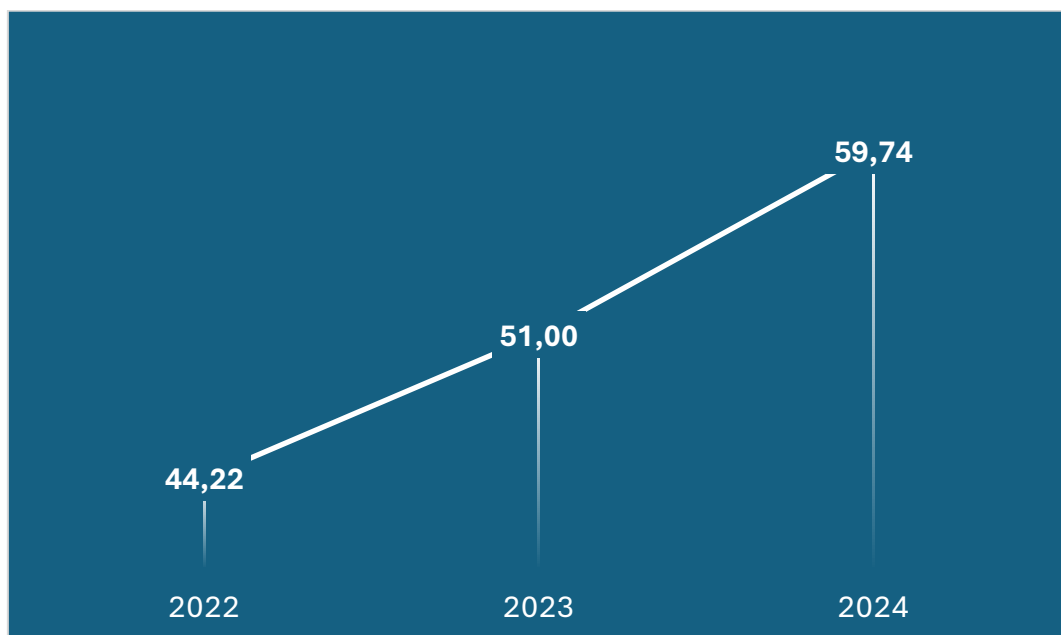
Tabel 3.9 Capaian Indikator Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik	57,00%	59,74%	108,41%

Capaian indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan realisasi sebesar 59,74 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 57,00 persen sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja mencapai 108,41 persen. Keberhasilan melampaui target ini merupakan cerminan nyata dari efektivitas berbagai intervensi strategis yang telah dilakukan, mulai dari pemenuhan sarana prasarana hingga pemerataan tenaga pendidik berkualitas yang terbukti secara linier mampu meningkatkan mutu pembelajaran, literasi, dan numerasi di tingkat sekolah. Hal ini membuktikan bahwa transformasi pendidikan di Hulu Sungai Selatan telah berhasil mendorong mayoritas satuan pendidikan untuk beranjak dari kategori standar menuju standar kualitas yang unggul dan diakui secara nasional melalui platform Rapor Pendidikan.

b. Analisis Realisasi terhadap Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Grafik 3. 8 Perkembangan Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2025



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merefleksikan keberhasilan transformasi pendidikan di Hulu Sungai Selatan. Dimulai dari angka **44,22 persen** pada tahun **2022**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil melampaui ambang batas **51,00 Persen** pada tahun **2023**, dan terus melesat hingga mencapai **59,74 persen** pada tahun **2024**.

Pertumbuhan sebesar 8,74 persen dari tahun 2023 ke 2024 merupakan lonjakan tertinggi dalam periode ini. Terkait dengan kinerja tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini sedang dalam posisi menunggu rilis data Rapor Pendidikan secara resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Meskipun data resmi belum diterbitkan, optimisme terhadap keberlanjutan tren positif tetap tinggi.

Secara kumulatif, potret pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kontras performa yang signifikan antara aspek lingkungan sekolah dan capaian akademis pada 251 satuan pendidikan yang dianalisis. Keunggulan mutlak terlihat pada Iklim Keamanan (D.4) yang menjadi indikator terbaik dengan 94 persen sekolah telah berkategori "Baik", mencerminkan lingkungan belajar yang sangat kondusif dan stabil di Hulu Sungai Selatan. Namun, keberhasilan lingkungan ini belum linear dengan hasil belajar akademis, di mana Numerasi (A.2) menjadi titik lemah utama dengan hanya 50 persen sekolah berkategori "Baik" dan masih terdapat 16 persen atau 41 sekolah dalam kategori "Kurang". Kondisi ini menegaskan perlunya pergeseran fokus strategi dari sekadar penguatan iklim sekolah menuju intervensi pedagogis yang lebih intensif guna mendongkrak kompetensi dasar peserta didik di bidang literasi dan numerasi.

c. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Jangka Menengah (RPJMD)

Tabel 3.10 Capaian Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2030
Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik (Persen)	N/A	44,22	51,00	59,74	N/A	57,00	88,00

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan performa mutu pendidikan yang sangat progresif dan konsisten, terlihat dari tren peningkatan persentase satuan pendidikan berkategori baik yang tumbuh dari 44,22 persen pada tahun 2022 menjadi 51,00 persen pada tahun 2023, hingga mencapai 59,74 persen pada tahun 2024.

Pencapaian pada tahun 2024 ini menjadi *milestone* strategis karena secara resmi telah melampaui target RPJMD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 57,00 persen setahun lebih awal dari jadwal perencanaan semula. Meskipun realisasi tahun 2025 saat ini masih berstatus menunggu rilis resmi dari Kemendikdasmen, keberhasilan melampaui target jangka menengah ini memberikan landasan optimisme yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengejar target jangka menengah daerah sebesar 88,00 persen pada tahun 2030, dengan catatan fokus ke depan harus mulai bergeser pada penguatan kompetensi literasi dan numerasi guna mengimbangi capaian iklim keamanan sekolah yang sudah sangat unggul.

d. Analisis Realisasi terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lain dan Nasional

Terkait dengan Analisis Realisasi terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lain dan Nasional untuk indikator "Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik", informasi tersebut tidak dapat disajikan dalam laporan ini. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang bersifat spesifik (lokal) dan dikembangkan secara mandiri dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengukur mutu pendidikan secara agregat.

Oleh karena itu, angka ini tidak dapat dibandingkan secara langsung (*apple-to-apple*) dengan capaian di tingkat kabupaten/kota lain, tingkat provinsi, maupun nasional.

e. Analisis Faktor Pendorong/Penghambat Kinerja serta Alternatif Solusi

Capaian impresif pada indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang berhasil melampaui target RPJMD tahun 2025 lebih awal, bukanlah sebuah kebetulan semata. Hasil ini merupakan manifestasi dari interaksi kompleks antara konsistensi kebijakan strategis, ketepatan alokasi sumber daya, serta dinamika operasional di tingkat satuan pendidikan. Angka 59,74 persen yang diraih pada tahun 2024 mencerminkan adanya energi positif dalam sistem pendidikan daerah, namun di balik pertumbuhan tersebut, tetap terdapat variabel-variabel yang perlu dibedah secara kritis.

Identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat kinerja menjadi langkah esensial untuk memahami "mesin" di balik keberhasilan, sekaligus memetakan "titik sumbat" yang masih menghalangi pencapaian target yang lebih

tinggi. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan apa yang telah terjadi, tetapi lebih jauh sebagai landasan dalam merumuskan alternatif solusi. Dengan memahami akar penyebab dari setiap capaian, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjaga momentum keberhasilan sekaligus melakukan mitigasi yang tepat terhadap tantangan akademis, terutama dalam menyeimbangkan antara keunggulan iklim keamanan sekolah dengan penguatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.

Faktor Pendorong:

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatatkan pencapaian yang sangat impresif dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, di mana sebanyak 235 satuan pendidikan atau 94 persen telah mencapai kategori "Baik" pada indikator iklim keamanan sekolah dengan tren peningkatan yang konsisten di 166 sekolah. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas daerah dalam membangun lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, hukuman fisik, serta kekerasan seksual, yang merupakan fondasi fundamental bagi terciptanya proses transformasi ilmu pengetahuan yang berkualitas. Dengan terciptanya rasa aman yang merata, sekolah-sekolah di HSS tidak hanya sekadar menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi juga telah bertransformasi menjadi ruang lindung yang menjamin tumbuh kembang karakter peserta didik secara optimal.
- Sebanyak 171 satuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah atau 68 persen meraih predikat "Baik" dalam indikator pengalaman pelatihan guru, yang mencerminkan tingginya antusiasme dan komitmen profesionalisme para pendidik di daerah. Capaian positif ini didorong oleh keaktifan guru dalam mengakses berbagai modul peningkatan kompetensi secara mandiri maupun kolektif, terutama melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Motivasi yang kuat untuk terus berkembang ini menjadi modal intelektual yang sangat berharga bagi daerah, karena kesiapan guru dalam beradaptasi dengan transformasi kurikulum merupakan kunci utama dalam menjamin keberhasilan implementasi pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik di seluruh pelosok Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Implementasi nilai-nilai karakter di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan progresivitas yang menggembirakan, di mana sebanyak 158 satuan pendidikan atau 63 persen telah mencapai predikat "Baik" dalam karakter peserta didik, diperkuat dengan capaian 190 sekolah atau 76 persen yang memiliki iklim inklusivitas berkategori "Baik". Data ini menegaskan bahwa lingkungan pendidikan di Hulu Sungai Selatan telah berhasil bertransformasi menjadi ruang yang sangat ramah terhadap keberagaman serta sukses dalam menginternalisasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila kepada peserta didik secara konsisten. Keberhasilan dalam membangun empati, menghargai perbedaan, dan memperkuat integritas ini menjadi modal sosial yang sangat kuat bagi generasi muda untuk tumbuh dalam ekosistem kebhinekaan yang harmonis dan inklusif.

Faktor Penghambat:

- Meskipun partisipasi pendidik dalam pengembangan kompetensi tergolong tinggi dengan 171 satuan pendidikan meraih predikat "Baik" pada pengalaman pelatihan guru, realitas di ruang kelas menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang cukup signifikan. Data mengungkap bahwa Kualitas Pembelajaran baru mencapai kategori "Baik" di 126 sekolah, sementara 101 sekolah atau 40 persen lainnya masih tertahan di kategori "Sedang". Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingginya frekuensi pelatihan yang diikuti guru belum sepenuhnya bertransformasi secara efektif menjadi praktik mengajar yang berdampak langsung di kelas, dengan kata lain penguasaan materi pelatihan masih bersifat teoritis dan memerlukan pendampingan lebih intensif agar mampu mengubah metodologi pengajaran menjadi lebih berkualitas dan inovatif.
- Capaian hasil belajar akademis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih menunjukkan tantangan besar dengan baru sekitar 50 persen satuan pendidikan yang berhasil meraih kategori "Baik" pada indikator Literasi dan Numerasi. Fenomena ini diperkuat oleh tren kompetensi Literasi yang bersifat sangat fluktuatif, di mana meskipun terdapat 123 sekolah yang mencatatkan kenaikan, namun terdapat 116 sekolah lainnya yang justru mengalami penurunan capaian. Dinamika data tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan mutu akademis di Hulu Sungai Selatan belum berjalan secara konsisten dan

masih berada pada posisi yang rapuh, sehingga menuntut adanya strategi intervensi pedagogis yang lebih terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan progresivitas hasil belajar peserta didik tidak mudah mengalami degradasi di masa mendatang.

- Walaupun indeks Kebinekaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini secara akumulatif masih berada pada level yang cukup tinggi, data menunjukkan sinyal peringatan yang perlu diwaspadai karena sebanyak 137 satuan pendidikan justru mengalami penurunan skor dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tren ini merupakan indikasi "lampu kuning" yang menandakan adanya potensi pengikisan nilai-nilai toleransi dan rasa kebangsaan dalam ekosistem sekolah jika tidak segera dilakukan langkah mitigasi yang konkret. Fenomena tersebut menuntut perhatian serius dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan agar degradasi pemahaman kebinekaan tidak menjadi tren permanen yang dapat merusak iklim inklusivitas serta harmoni sosial yang telah dibangun dengan baik.

Alternatif Solusi:

- Akademis (Numerasi & Literasi) Melakukan Fokus Intervensi Intensif untuk 41 Satuan Pendidikan kategori “Kurang” melalui pendampingan asimetris dan penguatan modul literasi-numerasi khusus bagi sekolah dengan rapor merah.
- Mengimplementasikan Supervisi Kelas Berbasis Dampak untuk 101 Satuan Pendidikan kategori “Sedang” pada kualitas pembelajaran dengan mentransformasi peran pengawas sekolah dari sekadar pemeriksa administrasi menjadi observer praktik mengajar di kelas (penerapan teori PMM).
- Melakukan Revitalisasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melalui pengayaan tema kebinekaan dan toleransi untuk menghentikan degradasi rasa kebangsaan untuk 137 Satuan Pendidikan yang mengalami penurunan skor Iklim Kebinekaan.
- Menginisiasi program Sharing/Best Practice dengan menjadikan 235 Satuan Pendidikan kategori "Baik" sebagai mentor/model bagi sekolah lain dalam penanganan perundungan dan kekerasan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan akumulasi dari efektivitas berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran "Meningkatnya Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan" merupakan pilar fundamental sekaligus mesin penggerak utama dalam ekosistem pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mutu kelembagaan bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan mencakup standarisasi manajemen, profesionalisme SDM, dan akuntabilitas operasional yang berdampak langsung pada capaian Rapor Pendidikan. Institusi dengan tata kelola yang matang terbukti lebih efektif dalam mengelola sumber daya serta mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara berkelanjutan, sehingga mampu mentransformasi kebijakan daerah menjadi kualitas pembelajaran nyata di ruang kelas yang tercermin pada skor rapor yang positif.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah menitikberatkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui penguatan status akreditasi dan peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah. Kelembagaan yang terstandarisasi memberikan fondasi kokoh bagi satuan pendidikan untuk tidak hanya mempertahankan predikat "Baik" pada aspek keamanan dan inklusivitas, tetapi juga melakukan akselerasi kualitas pada indikator literasi dan numerasi yang masih bersifat fluktuatif. Dengan demikian, penguatan aspek kelembagaan menjadi investasi strategis dalam memperluas jumlah sekolah berkategori "Baik" serta berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang	73,58	73,71	100,18	31.677.493.700	31.501.479.000	99,44

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Terakreditasi Minimal B (Persen)						

Realisasi indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B pada Program Pengelolaan Pendidikan menunjukkan capaian yang sangat memuaskan, yakni sebesar 73,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar 73,58 persen. Dengan tingkat capaian kinerja fisik yang mencapai 100,18 persen, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil melampaui target tahunan dalam upaya standardisasi mutu kelembagaan sekolah formal. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah pembinaan dan pendampingan satuan pendidikan formal dalam memenuhi kriteria kelayakan operasional serta standar nasional, yang menjadi fondasi utama bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Secara finansial, program ini didukung oleh alokasi anggaran yang signifikan sebesar Rp. 31.677.493.700 dengan realisasi keuangan yang sangat optimal mencapai Rp. 31.501.479.000 atau sebesar 99,44 persen. Penyerapan anggaran yang hampir sempurna ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi serta ketepatan sasaran dalam eksekusi berbagai sub kegiatan penguatan kelembagaan. Sinergi antara capaian fisik yang melampaui target dan realisasi keuangan yang akuntabel ini membuktikan bahwa investasi daerah pada aspek tata kelola sekolah telah memberikan hasil nyata, yang secara langsung mendukung tercapainya sasaran strategis peningkatan jumlah satuan pendidikan berkategori "Baik" dalam Rapor Pendidikan. Adapun capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatkan Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan SD yang Mendapatkan	100	100	100	15.915.483.260	15.805.688.660	99,31

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Pembinaan (Persen)						
	Jumlah Satuan Pendidikan SD Yang Patuh dan Aktif Terhadap Izin Pendidikan (Satuan Pendidikan)	1	4	400	15.803.340	15.801.340	99,99
Sub Kegiatan							
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan Kelembagaan (Satuan Pendidikan)	214	214	100	77.213.600	20.150.000	26,10
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan SD Yang Terfasilitasi Dalam Proses Akreditasi (Satuan Pendidikan)	214	214	100	15.787.536.660	15.785.538.660	99,99
	Jumlah Dokumen Penilaian Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional SD (Dokumen)	1	4	400	15.803.340	15.801.340	99,99
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang Terfasilitasi Dalam Manajemen Data (Satuan Pendidikan)	214	214	100	39.761.200	0	0
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang Mendapatkan Pembinaan (Persen)	100	100	100	7.529.397.120	7.490.938.420	99,49
	Jumlah Satuan Pendidikan SMP Yang	1	1	100	7.366.580	7.366.580	100

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Patuh dan Aktif Terhadap Izin Pendidikan (Satuan Pendidikan)						
Sub Kegiatan							
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan Kelembagaan (Satuan Pendidikan)	37	37	100	33.204.400	33.190.000	99,96
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP Yang Terfasilitasi Dalam Proses Akreditasi (Satuan Pendidikan)	37	37	100	7.359.213.420	7.359.213.420	100
	Jumlah Dokumen Penilaian Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional SMP (Dokumen)	1	1	100	7.366.580	7.366.580	100
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang Terfasilitasi Dalam Manajemen Data (Satuan Pendidikan)	37	37	100	124.700.600	98.535.000	79,02
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Pembinaan (Persen)	100	100	100	4.456.034.024	4.428.302.141	99,38
	Jumlah Satuan PAUD Yang Patuh dan Aktif Terhadap Izin Pendidikan	1	1	100	4.409.376	4.381.859	99,38

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	(Satuan Pendidikan)						
Sub Kegiatan							
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan Kelembagaan (Satuan Pendidikan)	298	298	100	17.421.200	17.300.000	99,30
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Satuan PAUD Yang Terfasilitasi Dalam Proses Akreditasi (Satuan Pendidikan)	298	198	66,44	4.404.966.624	4.377.477.141	99,38
	Jumlah Dokumen Penilaian Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional PAUD (Dokumen)	1	12	1200	4.409.376	4.381.859	99,38
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan PAUD yang Terfasilitasi Dalam Manajemen Data (Satuan Pendidikan)	298	298	100	33.646.200	33.525.000	99,64
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Satuan PNF yang Mendapatkan Pembinaan (Persen)	100	100	100	3.749.000.000	3.749.000.000	100
Sub Kegiatan							
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan PNF Yang Terfasilitasi Dalam Proses Akreditasi (Satuan Pendidikan)	15	11	73,33	3.749.000.000	3.749.000.000	100

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Realisasi kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar menunjukkan performa yang sangat optimal, di mana indikator Persentase Satuan Pendidikan SD yang Mendapatkan Pembinaan berhasil mencapai target 100 persen. Capaian ini menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan pendampingan dan pembinaan secara menyeluruh guna menjamin standarisasi layanan pendidikan. Keberhasilan fisik ini didukung oleh penyerapan anggaran yang sangat efisien, yakni sebesar Rp. 15.805.688.660 atau 99,31 persen dari alokasi Rp. 15.915.483.260 yang disediakan, yang mencerminkan ketepatan manajerial dalam pelaksanaan program pembinaan di lapangan.

Selain itu, capaian luar biasa terlihat pada indikator Jumlah Satuan Pendidikan SD yang Patuh dan Aktif Terhadap Izin Pendidikan, yang berhasil merealisasikan 4 satuan pendidikan dari target awal sebanyak 1 sekolah, atau mencapai tingkat kinerja sebesar 400 persen. Lonjakan capaian ini menunjukkan tingginya kesadaran dan ketaatan lembaga pendidikan terhadap regulasi perizinan yang berlaku, sekaligus efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dengan realisasi keuangan yang hampir sempurna mencapai 99,99 persen, kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan aspek legalitas dan kepatuhan administratif satuan pendidikan telah berjalan melampaui ekspektasi, yang menjadi modal penting bagi kredibilitas tata kelola pendidikan di daerah. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah berfokus pada penguatan kapasitas manajerial sesuai standar nasional berhasil merealisasikan target fisik secara penuh 100 persen kepada 214 satuan pendidikan, namun dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat efisien yakni hanya sebesar 26,10 persen atau senilai Rp. 20.150.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 77.213.600. Rendahnya realisasi keuangan yang berbanding terbalik dengan kesuksesan fisik ini mencerminkan adanya pola kerja yang sangat produktif, di mana pembinaan dilakukan melalui pendekatan integratif atau pemanfaatan platform digital yang secara signifikan memangkas biaya operasional seperti perjalanan dinas dan konsumsi, sehingga menciptakan efisiensi

anggaran tanpa sedikit pun mengurangi kualitas standarisasi manajemen sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebagai instrumen vital operasional sekolah menunjukkan performa yang sangat presisi dengan capaian fisik 100 persen pada fasilitasi akreditasi di 214 sekolah serta lonjakan signifikan hingga 400 persen pada penilaian kelayakan izin operasional. Keberhasilan fisik ini dibarengi dengan realisasi keuangan yang hampir menyentuh angka absolut sebesar 99,99 persen atau Rp. 15.785.538.660 dari pagu anggaran Rp. 15.787.536.660, yang mencerminkan tingkat akurasi dan keamanan sistem penyaluran dana bantuan operasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tingginya capaian pada aspek legalitas operasional tersebut juga menjadi bukti nyata responsivitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang luar biasa dalam menjamin kepastian hukum serta keberlangsungan layanan pendidikan bagi seluruh satuan pendidikan dasar di daerah.
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan yang mengemban fungsi kontrol dan manajemen data berhasil mencapai target fisik secara penuh 100 persen pada 214 satuan pendidikan, meskipun tanpa adanya realisasi anggaran. Fenomena ini merupakan indikator kuat keberhasilan Digitalisasi Manajemen Data (Dapodik) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana proses supervisi serta pemutakhiran data mampu dijalankan secara mandiri oleh operator sekolah dan dikoordinasikan secara internal oleh staf dinas sebagai tugas rutin tanpa memerlukan alokasi belanja operasional tambahan. Pencapaian fisik maksimal dengan anggaran nihil ini mencerminkan bentuk penghematan anggaran yang sangat strategis sekaligus membuktikan keamanan sistem tata kelola data pendidikan yang efisien dan tepat sasaran.

**Gambar 3.8 Kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**



2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan SMP yang Mendapatkan Pembinaan mencatatkan performa yang luar biasa dengan realisasi fisik mencapai 100 persen, yang menegaskan bahwa seluruh sekolah menengah pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah tersentuh layanan supervisi manajerial dan teknis secara menyeluruh tanpa ada satu pun yang terabaikan. Keberhasilan fisik ini didukung oleh akurasi perencanaan keuangan yang sangat tinggi, terlihat dari penyerapan anggaran sebesar 99,49 persen yaitu Rp. 7.490.938.420 dengan selisih efisiensi tipis sebesar 0,51 persen. Angka tersebut mencerminkan kombinasi ideal antara eksekusi kegiatan yang optimal dan kendali biaya yang sangat ketat, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada penguatan mutu layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di daerah.

Indikator Jumlah Satuan Pendidikan SMP Yang Patuh dan Aktif Terhadap Izin Pendidikan menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang sangat baik dengan realisasi fisik mencapai 100 persen atau sebanyak satu satuan pendidikan sesuai target yang ditetapkan, guna memastikan legalitas operasional sekolah menengah pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Secara finansial, indikator ini mencatatkan realisasi anggaran yang sangat presisi sebesar 100 persen atau Rp. 7.366.580, yang membuktikan ketepatan perencanaan biaya dalam proses penilaian kelayakan izin operasional sekolah, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah telah berhasil mencapai target fisik secara sempurna dengan memberikan fasilitasi kepada 37 satuan pendidikan SMP terealisasi 100 persen, yang memastikan seluruh sekolah menengah pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki standar tata kelola yang seragam. Keberhasilan operasional ini didukung oleh realisasi anggaran yang sangat optimal mencapai 99,96 persen atau sebesar Rp. 33.190.000 dari pagu Rp. 33.204.400 yang ditetapkan, menunjukkan tingkat efektivitas dan akurasi belanja yang sangat tinggi dalam mendukung penguatan kapasitas manajerial institusi pendidikan di daerah.
- Pengelolaan Dana BOS SMP menunjukkan performa yang sangat luar biasa dan presisi, di mana target fasilitasi akreditasi untuk 37 sekolah tercapai 100 persen serta penyusunan dokumen penilaian kelayakan izin operasional berhasil dituntaskan sepenuhnya. Secara finansial, sub-kegiatan ini mencatatkan realisasi anggaran yang sempurna yakni sebesar 100 persen yaitu Rp. 7.359.213.420 dengan pagu Rp. 7.359.213.420 untuk BOS dan Rp. 7.366.580 dari pagu Rp. 7.366.580 untuk izin operasional, yang membuktikan bahwa sistem penyaluran dana bantuan operasional serta penjaminan legalitas sekolah telah berjalan dengan sangat akurat dan responsif guna mendukung stabilitas layanan pendidikan menengah pertama.
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan berhasil memfasilitasi 37 satuan pendidikan SMP dengan capaian 100 persen, memastikan integritas dan kemutakhiran data pendidikan di seluruh wilayah. Menariknya, capaian fisik yang maksimal tersebut dibarengi dengan efisiensi anggaran yang cukup signifikan, di mana realisasi keuangan tercatat sebesar 79,02 persen yakni Rp. 98.535.000 dari pagu Rp. 124.700.600. Hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi sumber daya dan penggunaan metode kerja yang lebih efisien, seperti digitalisasi koordinasi yang mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Gambar 3.9 Kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan tercapainya target fisik 100 persen pada indikator Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Pembinaan, yang berarti seluruh lembaga PAUD di daerah tersebut telah mendapatkan pendampingan manajerial dan teknis secara merata. Capaian ini didukung oleh realisasi anggaran yang sangat efisien mencapai 99,38 persen atau sebesar Rp. 4.428.302.141 dari alokasi anggaran Rp. 4.456.034.024, yang mencerminkan ketepatan perencanaan dan eksekusi program dalam menjamin standarisasi mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada indikator Jumlah Satuan PAUD yang Patuh dan Aktif Terhadap Izin Pendidikan, pemerintah daerah berhasil memenuhi target fisik secara sempurna yaitu 100 persen dengan memastikan legalitas operasional satuan pendidikan anak usia dini tetap terjaga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan realisasi keuangan sebesar 99,38 persen atau senilai Rp. 4.381.859 dari pagu Rp. 4.409.376, terlihat adanya konsistensi dalam pengelolaan administrasi perizinan yang akuntabel, yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara PAUD sekaligus memperkuat kredibilitas tata kelola pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD mencatatkan kinerja yang sangat konsisten dengan tercapainya target fisik secara penuh 100 persen, di mana sebanyak 298 satuan PAUD telah mendapatkan fasilitasi

pembinaan kelembagaan guna memastikan standarisasi tata kelola di tingkat dasar. Keberhasilan ini didukung oleh realisasi anggaran yang sangat optimal sebesar 99,30 persen atau senilai Rp. 17.300.000 dari alokasi anggaran Rp. 17.421.200, yang menunjukkan ketepatan manajerial dan efisiensi belanja dalam menyelenggarakan pendampingan bagi seluruh satuan PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Pengelolaan Dana BOP PAUD menunjukkan dinamika kinerja yang bervariasi, di mana fasilitasi akreditasi terealisasi sebesar 66,44 persen yaitu 198 dari 298 satuan PAUD, namun di sisi lain terdapat lonjakan capaian luar biasa pada penilaian izin operasional yang mencapai 1.200 persen atau 12 dokumen dari target semula 1 dokumen. Meskipun target fisik akreditasi belum terpenuhi sepenuhnya kemungkinan dipengaruhi oleh kesiapan internal sekolah atau jadwal penilaian eksternal serapan anggaran 99,38 persen yaitu Rp. 4.377.477.141 dari pagu Rp. 4.404.966.624 dan Rp. 4.381.859 dari pagu Rp. 4.409.376 dengan realisasi 99,38 persen, yang mencerminkan optimalnya penyaluran dana bantuan operasional untuk mendukung keberlangsungan aktivitas belajar mengajar serta penguatan legalitas lembaga PAUD secara masif.
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan berhasil mencapai performa maksimal dengan memfasilitasi manajemen data bagi 298 satuan PAUD 100 persen di seluruh wilayah daerah. Tingginya capaian fisik tersebut diimbangi dengan akurasi penyerapan anggaran yang sangat presisi mencapai 99,64 persen atau sebesar Rp. 33.525.000 dari total pagu Rp. 33.646.200, yang membuktikan bahwa fungsi kontrol, perencanaan, dan integritas data pendidikan anak usia dini telah dijalankan dengan sangat profesional dan akuntabel guna mendukung pengambilan kebijakan pendidikan yang berbasis data.

**Gambar 3.10 Kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini**



4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatatkan capaian kinerja yang sempurna dengan realisasi fisik sebesar 100 persen pada indikator Persentase Satuan PNF yang Mendapatkan Pembinaan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau satuan pendidikan non-formal lainnya telah mendapatkan pendampingan secara menyeluruh, guna memastikan kualitas layanan pendidikan kesetaraan tetap terjaga dan merata bagi seluruh warga belajar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara finansial, pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan tingkat akurasi dan akuntabilitas yang absolut dengan realisasi anggaran mencapai 100 persen atau senilai Rp. 3.749.000.000. Ketepatan antara alokasi dan serapan dana ini membuktikan bahwa setiap tahapan program pendidikan non-formal telah direncanakan dengan sangat presisi dan dieksekusi secara optimal. Sinergi antara ketuntasan target fisik dan penyerapan anggaran yang sempurna ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat jalur pendidikan alternatif sebagai solusi inklusif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan mencatatkan realisasi keuangan yang sempurna sebesar 100 persen yaitu Rp. 3.749.000.000, namun capaian fisiknya pada indikator fasilitasi akreditasi belum mencapai target maksimal, yakni sebesar 73,33 persen dengan realisasi 11 dari 15 satuan PNF. Serapan dana yang optimal menunjukkan bahwa dukungan operasional bagi warga belajar di jalur nonformal tetap

tersalurkan secara penuh guna menjaga keberlangsungan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 3.11 Kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan



2. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Peserta Didik” merupakan indikator keberhasilan paling fundamental dari seluruh rangkaian intervensi pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jika mutu kelembagaan adalah mesinnya, maka kualitas peserta didik adalah hasil nyata yang dihasilkan. Fokus sasaran ini bergeser dari sekadar partisipasi kehadiran di sekolah menjadi kualitas hasil belajar/*learning outcomes*. Hal ini selaras dengan visi daerah untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan daya saing yang tinggi. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Peserta Didik

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Kemampuan Literasi (Skor)	66,00	63,31	95,92	217.894.870	193.429.667	88,77
	Nilai Kemampuan Numerasi (Skor)	58,50	56,39	96,39	72.606.567	43.446.667	59,84
	Persentase Peserta Didik yang Berprestasi (Persen)	8,80	13,45	152,84	396.271.450	322.662.500	81,42

Capaian kemampuan akademik peserta didik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada aspek literasi dan numerasi menunjukkan performa yang stabil namun tetap memerlukan akselerasi lebih lanjut untuk mencapai target ideal. Nilai kemampuan literasi terealisasi dengan skor sebesar 63,31 atau 95,92 persen dengan realisasi anggaran Rp. 193.429.667 dari pagu Rp. 217.894.870 yaitu 88,77 persen. Sedangkan kemampuan numerasi terealisasi dengan skor sebesar 56,39 atau 96,39 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.446.667 dari pagu Rp. 72.606.567 yaitu 59,84 persen, meskipun secara kuantitatif sedikit di bawah target, sudah mendekati ambang batas kualitas yang ditetapkan. Menariknya, pada indikator kemampuan numerasi, capaian fisik yang mendekati target tersebut berhasil diraih dengan realisasi keuangan yang sangat efisien, yakni hanya sebesar 59,84 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi penguatan kemampuan nalar peserta didik dilakukan dengan prinsip penghematan anggaran yang signifikan melalui optimalisasi metode pembelajaran tanpa memerlukan belanja operasional yang besar.

Di sisi lain, aspek Persentase Peserta Didik yang Berprestasi mencatatkan capaian luar biasa yang melampaui ekspektasi dengan realisasi sebesar 13,45 persen, atau mencapai tingkat kinerja sebesar 152,84 persen dari target awal. Lonjakan prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa bakat dan potensi peserta didik baik dalam bidang akademis maupun non akademis, berkembang pesat melebihi parameter standar yang diproyeksikan. Keberhasilan ini didukung oleh penyerapan anggaran yang proporsional sebesar 81,42 persen yaitu Rp. 322.662.500 dari pagu sebesar Rp. 396.271.450, yang menunjukkan bahwa investasi daerah dalam mewadahi berbagai ajang kompetisi dan pengembangan talenta peserta didik telah membuahkan hasil yang sangat produktif dalam menciptakan generasi yang berdaya saing tinggi di tingkat yang lebih luas. Adapun Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung sasaran dan indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Peserta Didik

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik SD Dengan Kemampuan	70	68,85	98,36	31.903.600	31.570.000	98,95

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Literasi Mencapai Kompetensi Minimum (Persen)						
	Persentase Peserta Didik SD Dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum (Persen)	69	67,40	97,68	26.293.600	14.340.000	54,54
	Jumlah Peserta Didik SD Yang Meraih Prestasi Akademik Dan Non Akademik (Peserta Didik)	156	138	88,46	109.764.500	78.575.000	71,59
Sub Kegiatan							
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Literasi Bagi Peserta Didik SD (Kegiatan)	1	1	100	15.951.800	15.770.000	98,86
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD (Kombel)	214	214	100	15.951.800	15.800.000	99,05
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Peserta Didik SD yang Mengikuti Pembelajaran Dengan Menggunakan Metode "ASIK" (Aktif, Seru, Inovatif, dan Kreatif) (Peserta Didik)	15.850	15.850	100	15.951.800	4.000.000	25,08
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pelatihan Pembelajaran Berbasis Numerasi Bagi Peserta Didik SD (Kegiatan)	1	1	100	10.341.800	10.340.000	99,98

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik Prestasi (Peserta Didik)	1.200	1.200	100	176.380.500	145.191.000	82,32
	Jumlah Peserta Didik SD yang Mengikuti Festival Sastra Lomba Literasi Bahasa Indonesia dan Daerah (Peserta Didik)	140	140	100	18.634.000	18.634.000	100
	Persentase Peserta Didik SD yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Lingkungan dan Kesehatan (Persen)	100	100	100	0	0	0
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik SMP Dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum (Persen)	75	72,93	97,24	182.041.903	157.963.000	86,77
	Persentase Peserta Didik SMP Dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum (Persen)	72	68,07	94,54	42.363.600	25.210.000	59,51
	Jumlah Peserta Didik SMP Yang Yang Meraih Prestasi Akademik Dan	238	229	96,22	237.365.700	201.512.500	84,90

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Non Akademik (Peserta Didik)						
Sub Kegiatan							
Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Literasi Bagi Peserta Didik SMP (Kegiatan)	1	1	100	5.831.800	5.830.000	99,97
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP (Kombel)	12	12	100	176.210.103	152.133.000	86,34
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pelatihan Pembelajaran Berbasis Numerasi Bagi Peserta Didik SMP (Kegiatan)	1	1	100	42.363.600	25.210.000	59,51
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Prestasi (Peserta Didik)	1.443	1.443	100	386.310.700	350.457.500	90,72
	Jumlah Peserta Didik SMP yang Mengikuti Festival Sastra Lomba Literasi Bahasa Indonesia dan Daerah (Peserta Didik)	185	185	100	61.755.000	61.755.000	100
	Persentase Peserta Didik SMP yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Lingkungan dan Kesehatan (Persen)	100	100	100	0	0	0

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD Berprestasi yang Menerima Beasiswa Pendidikan (Peserta Didik)	84	60	71,43	49.141.250	42.575.000	86,64
Sub Kegiatan							
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Prestasi (Peserta Didik)	1.020	1.020	100	110.441.250	103.875.000	94,05
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Peserta Didik PNF Dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum (Persen)	43	42,11	97,93	3.949.367	3.896.667	98,67
	Persentase Peserta Didik PNF Dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum (Persen)	52	51,49	99,02	3.949.367	3.896.667	98,67
Sub Kegiatan							
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Literasi Bagi Peserta Didik PNF (Kegiatan)	1	1	100	11.848.100	11.690.000	98,67
	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Numerasi Bagi Peserta Didik	1	1	100			

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	PNF (Kegiatan)						

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar menunjukkan menunjukkan hasil yang sangat mendekati target, dengan tingkat kinerja kemampuan literasi mencapai 98,36 persen dengan realisasi skor 68,85 dari target 70,00 dan kemampuan numerasi sebesar 97,68 persen dengan realisasi skor 67,40 dari target 69,00. Realisasi anggaran literasi tercatat Rp. 31.570.000 dari pagu Rp. 31.903.600 dengan capaian 98,95 persen, sedangkan kemampuan numerasi terealisasi sebesar Rp. 14.340.000 dari pagu Rp. 26.293.600 dengan capaian 54,54 persen. Hal ini menandakan bahwa kualitas dasar pembelajaran akademis di tingkat sekolah dasar sudah berjalan pada jalur yang tepat menuju standar nasional.

Sementara itu, pada aspek pengembangan bakat, sebanyak 138 peserta didik SD berhasil meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik dari target 156 peserta didik, mencatatkan tingkat capaian kinerja sebesar 88,46 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun secara kuantitatif jumlah peserta berprestasi belum menyentuh angka absolut, realisasi ini didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup efisien sebesar 71,59 persen Yaitu Rp. 78.575.000 dari alokasi anggaran Rp. 109.764.500. Efisiensi ini menunjukkan bahwa manajemen kegiatan perlombaan dan pembinaan prestasi peserta didik telah dikelola dengan prinsip ketepatan biaya, di mana pemerintah daerah tetap mampu memfasilitasi talenta-talenta muda untuk berkompetisi di berbagai tingkatan dengan penggunaan anggaran yang selektif dan terkontrol. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik telah menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan menuntaskan target kegiatan literasi bagi peserta didik SD secara penuh yaitu 100 persen. Keberhasilan fisik ini diimbangi dengan serapan anggaran yang sangat akuntabel mencapai 98,86 persen atau sebesar Rp. 15.770.000 dari pagu Rp. 15.951.800,

yang menandakan bahwa proses penguatan literasi di tingkat dasar telah terlaksana sesuai rencana operasional guna memastikan setiap peserta didik mendapatkan paparan kegiatan belajar yang berkualitas dan terstruktur.

- Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhasil mengaktifkan 214 Komunitas Belajar di seluruh satuan pendidikan SD dengan capaian 100 persen, serta dukungan finansial yang sangat presisi sebesar 99,05 persen dengan realisasi anggaran Rp. 15.800.000 dari pagu Rp. 15.951.800. Terbentuknya Kombel secara merata di setiap sekolah ini menjadi bukti komitmen kuat dalam menciptakan ekosistem pendidik yang kolaboratif, yang secara langsung berdampak pada peningkatan mutu pendampingan belajar bagi peserta didik melalui pertukaran praktik baik antar guru secara berkelanjutan.
- Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan memiliki capaian yang sangat menonjol di mana metode pembelajaran "ASIK" (Aktif, Seru, Inovatif, dan Kreatif) berhasil menjangkau 15.850 peserta didik SD dengan capaian 100 persen dan tingkat efisiensi anggaran yang sangat drastis, yakni hanya menyerap 25,08 persen yaitu Rp. 4.000.000 dari alokasi anggaran Rp. 15.951.800 yang tersedia. Rendahnya realisasi keuangan di tengah jangkauan audiens yang masif ini mengindikasikan keberhasilan pemanfaatan platform digital dan kreativitas konten yang mampu menekan biaya produksi tanpa sedikit pun mengurangi efektivitas transformasi pembelajaran modern.
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pelatihan pembelajaran berbasis numerasi bagi peserta didik SD berhasil direalisasikan sepenuhnya yakni 100 persen dengan ketepatan anggaran yang hampir absolut mencapai 99,98 persen dengan realisasi anggaran Rp. 10.340.000 dari pagu Rp. 10.341.800. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi teknis untuk memperkuat kemampuan nalar numerasi peserta didik melalui integrasi teknologi telah terencana dan terekskusi dengan sangat tajam, memastikan alokasi dana terserap secara optimal untuk peningkatan kompetensi spesifik peserta didik yang relevan dengan kebutuhan zaman.

- Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa mencatatkan performa gemilang dengan partisipasi penuh 1.200 peserta didik pada ajang kompetisi prestasi dan 140 peserta didik pada festival sastra dengan capaian 100 persen, serta cakupan pembinaan kesehatan lingkungan yang mencapai seluruh target tanpa beban biaya. Secara finansial, pengelolaan kegiatan ini sangat efisien dengan serapan 82,32 persen pada ajang kompetisi umum dengan realisasi anggaran Rp. 145.191.000 dari pagu Rp. 176.380.500 dan serapan sempurna 100 persen pada festival sastra dengan realisasi anggaran Rp. 18.634.000 dari pagu yang ditetapkan, yang membuktikan bahwa pemberdayaan potensi non akademik peserta didik dikelola secara profesional dan hemat biaya, bahkan mampu mengoptimalkan program kesehatan melalui kerja sama lintas sektor yang produktif tanpa memerlukan tambahan belanja operasional.

Gambar 3.12 Kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Didik Sekolah Dasar



2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tingkat

keberhasilan yang sangat tinggi, dengan indikator kemampuan literasi mencapai 97,24 persen dengan realisasi skor 72,93 dan kemampuan numerasi sebesar 94,54 persen dengan realisasi skor 68,07 dari target yang ditetapkan. Meskipun secara angka riil sedikit di bawah target, efektivitas kegiatan terlihat sangat menonjol pada aspek numerasi, di mana target fisik yang hampir tuntas tersebut berhasil dicapai dengan realisasi Realisasi anggaran literasi tercatat Rp. 157.963.000 dari pagu Rp. 182.041.903 dengan capaian 86,77 persen, sedangkan kemampuan numerasi terealisasi sebesar Rp. 25.210.000 dari pagu Rp. 42.363.600 dengan capaian 59,51 persen. Hal ini mencerminkan adanya strategi intervensi yang tajam dan hemat biaya dalam memperkuat nalar matematis peserta didik melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia di lingkungan sekolah menengah tanpa bergantung sepenuhnya pada belanja operasional yang besar.

Di sisi lain, pembinaan minat dan bakat siswa SMP juga mencatatkan hasil yang solid, di mana sebanyak 229 peserta didik berhasil meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, atau mencapai 96,22 persen dari target awal. Keberhasilan dalam mencetak talenta-talenta berprestasi ini didukung oleh penyerapan anggaran sebesar 84,90 persen yaitu Rp. 201.512.500 dari alokasi anggaran Rp. 237.365.700, yang mengindikasikan manajemen kegiatan kompetisi yang terencana dengan baik dan berorientasi pada hasil. Sinergi antara pencapaian akademis yang stabil dan pertumbuhan prestasi peserta didik ini mempertegas posisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menciptakan output pendidikan yang kompetitif dan berkarakter di tingkat menengah. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Sub kegiatan ini menunjukkan tingkat akurasi perencanaan yang hampir absolut, di mana target satu kegiatan proses belajar literasi berbasis digital berhasil dituntaskan 100 persen dengan realisasi anggaran mencapai 99,97 persen atau sebesar Rp. 5.830.000 dari pagu Rp. 5.831.800. Pencapaian ini menegaskan komitmen dinas dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum literasi SMP secara efektif, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan terkonversi secara nyata menjadi materi pembelajaran

digital yang berkualitas bagi peserta didik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan memfasilitasi 12 Komunitas Belajar di jenjang SMP telah tercapai sepenuhnya 100 persen, menciptakan ruang kolaborasi yang solid bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas instruksional di kelas. Secara finansial, sub kegiatan ini mencatatkan efisiensi sebesar 13,66 persen dengan realisasi anggaran 86,34 persen yaitu Rp. 152.133.000 dari alokasi anggaran Rp. 176.210.103, yang mengindikasikan bahwa aktivasi wadah berbagi praktik baik antar-guru ini mampu dikelola secara produktif dan hemat biaya melalui penguatan sinergi internal tanpa harus menyerap seluruh alokasi dana operasional yang tersedia.
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan difokuskan pada pelatihan pembelajaran berbasis numerasi mencatatkan efisiensi anggaran yang sangat luar biasa, di mana target fisik satu kegiatan utama tercapai 100 persen namun hanya menyerap 59,51 persen anggaran atau senilai Rp. 25.210.000 dari total pagu Rp. 42.363.600. Keberhasilan mencapai target fisik dengan sisa anggaran yang cukup besar ini membuktikan bahwa penguatan nalar matematis melalui perangkat TIK dapat diakselerasi secara cerdas, kemungkinan melalui optimalisasi instruktur internal atau penggunaan platform daring yang memangkas biaya logistik tanpa mengurangi esensi kompetensi yang diberikan kepada peserta didik.
- Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa mencatatkan partisipasi masif dengan keterlibatan 1.443 peserta didik pada ajang kompetisi dan 185 peserta didik pada festival sastra yang semuanya terealisasi 100 persen, didukung oleh manajemen anggaran yang sangat akuntabel dengan realisasi Rp. 350.457.500 dari pagu Rp. 386.310.700 dengan capaian 90,72 persen untuk pelaksanaan lomba, dan Rp. 61.755.000 dari pagu Rp. 61.755.000 dengan capaian 100 persen. Menariknya, pembinaan di bidang lingkungan dan kesehatan berhasil mencakup seluruh target 100 persen tanpa realisasi anggaran, yang menunjukkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor atau pemberdayaan program rutin

yang sangat efektif. Hal ini mempertegas bahwa pengembangan karakter dan prestasi non-akademik siswa SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menjadi ekosistem yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Gambar 3.13 Kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama



3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencatatkan capaian fisik sebesar 71,43 persen melalui penyaluran bantuan kepada 60 peserta didik dari target 84 anak, dengan serapan anggaran mencapai 86,64 persen atau senilai Rp. 42.575.000 dari pagu Rp. 49.141.250. Meskipun target kuantitas belum tercapai sepenuhnya, kegiatan ini tetap menjadi langkah strategis dalam memberikan stimulan bagi pertumbuhan bakat anak sejak usia emas sekaligus memastikan distribusi beasiswa yang akuntabel guna mendukung kualitas peserta didik pada jenjang pendidikan paling dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik pada jenjang PAUD mencatatkan performa yang sangat impresif dengan keberhasilan mencapai target fisik secara penuh 100 persen melalui partisipasi sebanyak 1.020 peserta didik dalam berbagai ajang kompetisi prestasi. Keberhasilan dalam memfasilitasi talenta anak usia dini ini dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang sangat efisien, yakni sebesar 94,05 persen atau senilai Rp. 103.875.000 dari pagu Rp. 110.441.250, yang menunjukkan bahwa manajemen kegiatan perlombaan telah dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran. Sinergi antara partisipasi masif dan kendali biaya yang baik ini membuktikan komitmen daerah dalam membangun fondasi kepercayaan diri serta kreativitas siswa sejak usia emas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas keuangan.

Gambar 3.14 Kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Didik PAUD



4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan menunjukkan performa yang sangat konsisten dengan capaian kinerja fisik yang hampir menyentuh target absolut, yaitu sebesar 97,93 persen pada

kompetensi literasi dengan realisasi 42,11 persen dari target 43 persen dan capaian 99,02 persen pada kompetensi numerasi dengan realisasi 51,49 persen dari target 52 persen. Keberhasilan dalam mendekati ambang kompetensi minimum bagi warga belajar di jalur non formal ini dibarengi dengan realisasi anggaran yang sangat presisi sebesar 98,67 persen yaitu Rp. 3.896.667 dari target Rp. 3.949.367, yang mencerminkan efektivitas perencanaan serta akuntabilitas penggunaan dana operasional yang sangat tinggi. Sinergi antara ketepatan serapan anggaran dan pencapaian standar akademik ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola jalur pendidikan alternatif secara berkualitas, memastikan setiap warga belajar mendapatkan hak pendidikan yang layak dan terstandarisasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- pada jalur Pendidikan Non Formal (PNF) mencatatkan kinerja yang sangat konsisten dan akurat, di mana seluruh target fisik untuk kegiatan proses belajar literasi maupun numerasi berhasil dituntaskan sepenuhnya 100 persen. Keberhasilan eksekusi sub kegiatan ini didukung oleh penyerapan anggaran yang sangat presisi sebesar 98,67 persen atau senilai Rp. 11.690.000 dari target Rp. 11.848.100 untuk masing-masing bidang kompetensi, yang mencerminkan ketajaman perencanaan biaya dalam memfasilitasi peningkatan nalar kritis dan numerik warga belajar melalui pemanfaatan teknologi digital. Pencapaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara jalur formal dan non formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memastikan setiap program peningkatan kompetensi terbiayai dan terlaksana secara optimal.

Gambar 3. 15 Kegiatan Peningkatan Kualitas Peserta Didik PNF



3. Meningkatnya Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas

Sasaran “Meningkatnya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang Berkualitas” merupakan komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menempatkan SDM sebagai aktor utama transformasi pendidikan guna menghapus disparitas kualitas layanan antarwilayah. Melalui kebijakan distribusi yang proporsional serta penguatan profesionalisme berbasis kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik, sasaran ini bertujuan memastikan setiap satuan pendidikan memiliki akses terhadap tenaga pengajar yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi pembelajaran. Dengan mengoptimalkan komunitas belajar dan pelatihan berkelanjutan, pemerintah daerah berupaya membangun fondasi pendidikan yang inklusif demi menjamin hak setiap anak di seluruh pelosok Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan standar layanan pendidikan yang setara dan bermutu. Sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi	62,83	63,98	101,83	3.645.125.267	1.001.833.448	27,48

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	di Masing-Masing Sekolah (Persen)						

Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Tersertifikasi di Masing-Masing Sekolah menunjukkan performa yang melampaui ekspektasi dengan capaian kinerja fisik sebesar 101,83 persen dengan realisasi 63,98 persen dari target 62,83 persen, yang menandakan penguatan profesionalisme guru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan sangat progresif. Keberhasilan ini menjadi sangat menonjol karena diraih dengan tingkat efisiensi anggaran yang luar biasa, di mana realisasi keuangan hanya terserap sebesar 27,48 persen atau senilai Rp. 1.001.833.448 dari total pagu Rp. 3.645.125.267. Rendahnya penyerapan anggaran di tengah capaian prestasi yang melebihi target ini mengindikasikan adanya manajemen program yang sangat efektif, seperti pemanfaatan platform digital untuk verifikasi data sertifikasi serta optimalisasi koordinasi administratif yang mampu memangkas biaya operasional secara signifikan tanpa mengurangi kualitas pemenuhan standar kualifikasi pendidik. Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung sasaran dan indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang Meningkatkan Kompetensinya (Persen)	96	79	82,29	342.512.200	183.485.000	53,57
Sub Kegiatan							
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	Jumlah Pembinaan Kompetensi Tenaga	1	1	100	35.760.000	35.760.000	100

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	pendidik SD yang Dilaksanakan (Kegiatan)						
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Pembinaan Tenaga Kependidikan SD yang Dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	100	39.761.200	16.940.000	42,60
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang Lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan (Persen)	96	84	87,5	266.991.000	130.785.000	48,98
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang Meningkatkan Kompetensinya (Persen)	83	83	100	222.567.900	193.292.403	86,85
Sub Kegiatan							
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Pembinaan Kompetensi Tenaga pendidik SMP yang Dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	100	8.354.900	8.112.500	97,10
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Pembinaan Tenaga Kependidikan SD yang Dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	100	37.442.600	36.762.500	98,18
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83	83	100	176.770.400	148.417.403	83,96

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SMP yang Lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan (Persen)						
Kegiatan							
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Meningkatkan Kompetensinya (Persen)	100	93	93	3.076.095.800	621.159.378	20,19
Sub Kegiatan							
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Pembinaan Kompetensi Tenaga pendidik PAUD yang Dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	100	18.890.900	18.000.000	95,28
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD yang Dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	100	77.592.400	75.700.000	97,56
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan (Persen)	100	100	100	2.946.003.800	512.771.878	17,41

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar untuk indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang Meningkatkan Kompetensinya mencatatkan realisasi fisik sebesar 79 persen dari target 96 persen, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 82,29 persen. Belum tercapainya target fisik secara maksimal ini mengindikasikan adanya

tantangan dalam sinkronisasi jadwal pelatihan atau ketersediaan kuota pengembangan profesi, namun di sisi lain, realisasi keuangan menunjukkan efisiensi yang sangat besar yakni hanya terserap 53,57 persen atau senilai Rp. 183.485.000 dari target Rp. 342.512.200. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya internal dan metode pelatihan yang lebih ekonomis, sehingga peningkatan mutu SDM pendidik tetap berjalan produktif dengan penggunaan anggaran yang sangat terkontrol. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, Sub kegiatan ini mencatatkan kinerja yang sempurna dan sangat presisi. Di mana target satu kegiatan pembinaan kompetensi tenaga pendidik SD berhasil direalisasikan sepenuhnya 100 persen dengan penyerapan anggaran yang juga mencapai 100 persen yaitu Rp. 35.760.000 dari alokasi anggaran Rp. 35.760.000. Ketepatan antara perencanaan fisik dan keuangan ini menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas guru telah dieksekusi secara tuntas sesuai jadwal dan alokasi dana yang ditetapkan, guna memastikan tenaga pendidik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki bekal kompetensi yang relevan dalam menjalankan tugas instruksional di sekolah.
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, Sub kegiatan ini berhasil mencapai target fisik satu kegiatan utama yaitu 100 persen dengan tingkat efisiensi anggaran yang sangat signifikan, yakni hanya menyerap 42,60 persen atau Rp. 16.940.000 dari pagu total Rp. 39.761.200. Rendahnya realisasi keuangan di tengah keberhasilan fisik ini mengindikasikan adanya optimalisasi sumber daya pelatihan, seperti penggunaan platform daring atau narasumber internal dinas, yang mampu memangkas biaya operasional tanpa mengurangi efektivitas transfer pengetahuan teknologi informasi bagi staf kependidikan di sekolah dasar.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar mencatatkan realisasi kelulusan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sebesar 84 persen dari target 96

persen dengan tingkat capaian kinerja 87,5 persen, yang dibarengi dengan efisiensi anggaran yang cukup besar sebesar 48,98 persen yakni Rp. 130.785.000 dari Rp. 266.991.000 pagu yang tersedia. Meskipun persentase kelulusan belum mencapai angka absolut yang kemungkinan dipengaruhi oleh standar ketat penilaian kompetensi individu, serapan anggaran yang minim menunjukkan bahwa proses fasilitasi kenaikan jabatan dan administrasi kepegawaian guru SD dikelola dengan prinsip penghematan biaya yang sangat baik, memastikan dukungan karir tetap berjalan efektif dengan penggunaan anggaran yang selektif.

Gambar 3.16 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD



2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menunjukkan kinerja yang sangat presisi dengan tercapainya target Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMP yang Meningkatkan Kompetensinya secara penuh 100 persen dari target 83 persen. Keberhasilan fisik ini dibarengi dengan realisasi anggaran yang efisien sebesar 86,85 persen atau senilai Rp. 193.292.403 dari pagu Rp. 222.567.900, yang mencerminkan pola manajemen pengembangan SDM

yang produktif. Rendahnya serapan biaya dibandingkan capaian fisik yang sempurna ini mengindikasikan adanya optimalisasi metode pelatihan atau bimbingan teknis yang tepat sasaran, sehingga kualitas pendidik di jenjang menengah pertama tetap terjaga secara optimal dengan penggunaan anggaran yang sangat terkendali dan akuntabel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, Sub kegiatan ini telah terlaksana dengan sangat baik, mencapai target fisik secara penuh 100 persen melalui pelaksanaan satu kegiatan utama yang direncanakan. Dari sisi finansial, realisasi anggaran tercatat sebesar 97,10 persen atau senilai Rp. 8.112.500 dari alokasi anggaran Rp. 8.354.900, yang menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi dan akurat. Capaian ini menegaskan komitmen dinas dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kapasitas guru SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tetap selaras dengan standar kompetensi pendidik nasional.
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan menunjukkan performa yang solid dengan tercapainya target fisik satu kegiatan 100 persen dan serapan anggaran mencapai 98,18 persen atau Rp. 36.762.500 dari pagu Rp. 37.442.600. Ketepatan realisasi keuangan yang hampir menyentuh angka absolut ini mencerminkan perencanaan biaya operasional yang sangat presisi dalam memfasilitasi penguatan literasi digital bagi staf kependidikan, guna mendukung tata kelola administrasi sekolah yang lebih modern dan efisien di jenjang menengah pertama.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berhasil memenuhi target kinerja fisik secara sempurna 100 persen, di mana 83 persen pendidik dan tenaga kependidikan SMP dinyatakan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Menariknya, keberhasilan ini dicapai dengan efisiensi anggaran yang cukup baik, yakni hanya menyerap 83,96 persen atau sebesar Rp. 148.417.403 dari total pagu Rp. 176.770.400. Hal ini mengindikasikan bahwa proses fasilitasi

ujian kompetensi dan manajemen karir guru SMP telah dikelola secara efektif, memberikan kepastian jenjang profesi bagi para pendidik sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Gambar 3.17 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP



3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD yang Meningkatkan Kompetensinya mencatatkan capaian kinerja fisik yang sangat baik sebesar 93 persen dari target 100 persen. Meskipun secara kuantitatif terdapat selisih 7 persen dari target ideal, keberhasilan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam memperkuat standar kompetensi pendidik pada level pendidikan dasar paling dini. Hal yang paling mencolok dari capaian ini adalah tingkat efisiensi anggaran yang sangat luar biasa, di mana realisasi keuangan hanya sebesar 20,19 persen atau senilai Rp. 621.159.378 dari total pagu Rp. 3.076.095.800. Rendahnya serapan dana di tengah capaian fisik yang hampir tuntas ini mengindikasikan adanya optimalisasi strategi pengembangan SDM yang sangat ekonomis, seperti pemanfaatan pendampingan mandiri, pelatihan daring, atau kolaborasi

sumber daya yang mampu menekan biaya operasional secara signifikan tanpa mengurangi esensi peningkatan mutu pendidik PAUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Sub kegiatan ini menunjukkan keberhasilan penuh dalam membekali tenaga pendidik PAUD dengan keterampilan teknologi. Target fisik tercapai 100 persen dengan realisasi anggaran yang sangat proporsional sebesar 95,28 persen atau Rp. 18.000.000 dari alokasi anggaran Rp. 18.890.900. Hal ini mencerminkan pengelolaan kegiatan yang terukur dan efisien, di mana setiap alokasi dana secara efektif dikonversi menjadi peningkatan kapasitas guru dalam memproduksi konten edukatif digital yang kreatif dan relevan bagi anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan berjalan sangat akurat dengan capaian fisik 100 persen dan tingkat penyerapan anggaran mencapai 97,56 persen atau Rp. 75.700.000 dari Rp. 77.592.400 anggaran yang telah disediakan. Ketepatan finansial yang tinggi ini mengindikasikan bahwa perencanaan biaya untuk operasional pelatihan telah disusun dengan matang, memastikan dukungan teknis bagi tata kelola administrasi PAUD yang modern dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya deviasi anggaran yang berarti.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berhasil mencatatkan fenomena efisiensi yang luar biasa, di mana target kelulusan uji kompetensi tercapai sempurna 100 persen, namun hanya menyerap 17,41 persen dari total pagu anggaran yakni Rp. 512.771.878 dari alokasi Rp. 2.946.003.800. Keberhasilan mencapai target fisik secara total dengan sisa anggaran yang sangat besar menunjukkan manajemen pengembangan karir yang sangat cerdas, kemungkinan melalui optimalisasi sistem pengujian mandiri atau sinkronisasi program pusat sehingga jaminan kenaikan jenjang jabatan bagi pendidik PAUD terpenuhi dengan penghematan anggaran daerah yang sangat masif.

Gambar 3.18 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan PAUD



SASARAN III

Meningkatnya Pembangunan Dan Pelestarian Kebudayaan Daerah

Sasaran “Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah” menempatkan kebudayaan bukan sekadar sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai aset strategis dan energi kreatif yang menggerakkan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penguatan aspek kebudayaan menjadi kunci dalam menjaga jati diri masyarakat di tengah arus modernisasi. Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk menciptakan harmoni antara pelestarian nilai-nilai tradisi dengan pengembangan kreativitas kontemporer yang mampu memberikan dampak sosial maupun ekonomi bagi daerah.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), sebuah instrumen pengukuran yang bersifat multidimensi. IPK tidak hanya memotret upaya perlindungan cagar budaya atau kesenian tradisional secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi budaya, literasi budaya, dan ketahanan sosial budaya masyarakat. Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana ekosistem kebudayaan di Hulu Sungai Selatan telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berinovasi, dan melestarikan kearifan lokal secara berkelanjutan.

Fokus utama dari pembangunan kebudayaan ini mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan serta pengelolaan cagar budaya. Dengan meningkatnya IPK, diharapkan terjadi penguatan karakter masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai luhur daerah. Analisis pada bagian ini akan memaparkan bagaimana berbagai program pembinaan kesenian, perlindungan situs

sejarah, dan fasilitasi panggung budaya telah berkontribusi secara signifikan dalam menaikkan skor indeks kebudayaan daerah sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pusat pelestarian budaya yang dinamis di Kalimantan Selatan.

a. Analisis Realisasi dan Target Kinerja

Analisis realisasi dan target kinerja pada sasaran “Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah” merupakan instrumen kritikal untuk mengukur sejauh mana intervensi kebijakan telah memberikan dampak nyata terhadap ekosistem kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui perbandingan sistematis antara target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan capaian aktual di lapangan, bagian ini akan membedah efektivitas program-program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK). Fokus utama analisis ini tertuju pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai indikator komposit yang memotret kemajuan pembangunan karakter, ketahanan sosial, dan warisan budaya secara holistik. Dengan mengevaluasi ketepatan capaian fisik dan efisiensi serapan anggaran, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keberhasilan strategis sekaligus memetakan tantangan yang memerlukan akselerasi kebijakan di masa mendatang, guna memastikan kekayaan budaya di Hulu Sungai Selatan tetap lestari dan fungsional sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah

No	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,75 Indeks	61,94 Indeks	109,15%

Capaian kinerja pada indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dan melampaui ekspektasi strategis. Dengan target sebesar 56,75 Indeks, pemerintah daerah berhasil merealisasikan skor sebesar 61,94 Indeks, yang berarti tingkat capaian kinerja menyentuh angka 109,15 persen. Keberhasilan melampaui target hingga lebih dari 9 Persen ini menandakan adanya akselerasi yang signifikan

dalam penguatan jati diri daerah, di mana pembangunan karakter masyarakat dan pelestarian warisan budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkembang lebih pesat dari parameter standar yang diproyeksikan.

Tingginya skor IPK ini merupakan manifestasi dari keberhasilan pengelolaan berbagai dimensi kebudayaan secara holistik, mulai dari dimensi ekonomi budaya, literasi, hingga ketahanan sosial budaya. Realisasi sebesar 61,94 mencerminkan bahwa ekosistem kebudayaan di Hulu Sungai Selatan telah memberikan ruang ekspresi yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus membuktikan efektivitas berbagai program perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan yang dijalankan. Capaian luar biasa ini tidak hanya memperkuat posisi daerah sebagai pusat pelestarian tradisi di Kalimantan Selatan, tetapi juga menjamin bahwa pembangunan kebudayaan telah benar-benar hadir sebagai pilar penguat karakter bangsa yang fungsional dan berkelanjutan.

b. Analisis Realisasi terhadap Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Dalam melakukan tinjauan historis terhadap indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**, perlu disampaikan bahwa analisis perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilakukan pada periode laporan ini. Hal ini dikarenakan IPK merupakan parameter kinerja baru yang mulai diukur dan diintegrasikan secara formal ke dalam sistem pelaporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2025. Sebagai indikator yang baru ditetapkan, realisasi sebesar 61,94 Indeks pada tahun ini akan berfungsi sebagai nilai dasar (**baseline**) serta titik pijak utama bagi pemantauan tren pembangunan kebudayaan di masa mendatang. Meskipun belum memiliki pembandingan dari tahun sebelumnya, tingginya capaian kinerja yang menyentuh angka 109,15 persen terhadap target awal menunjukkan bahwa langkah awal penguatan ekosistem kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berada pada jalur yang tepat dan memiliki fondasi yang kuat untuk terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

c. Analisis Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Jangka Menengah (RPJMD)

Tabel 3.18 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) terhadap Target Akhir RPJMD

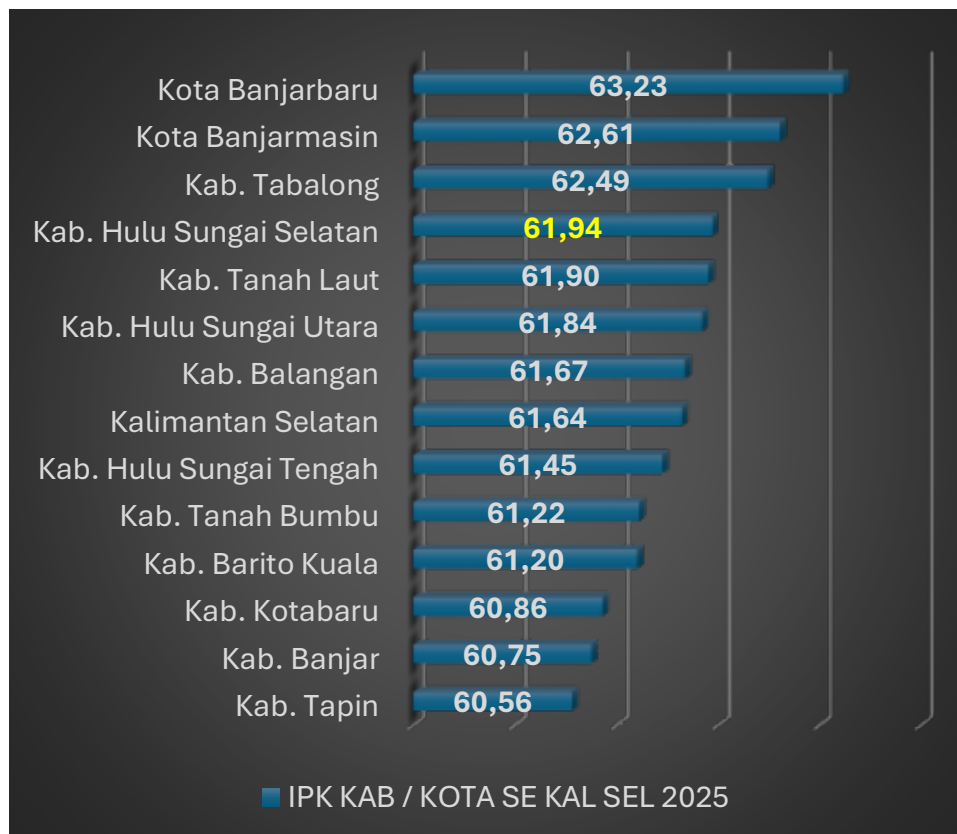
INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2030
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	N/A	N/A	N/A	61,94	56,75	72,00

Capaian **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 mencatatkan performa gemilang sebesar 61,94, melampaui target awal (56,75) dengan tingkat keberhasilan 109,15 persen. Sebagai indikator kinerja baru yang mulai diukur pada tahun ini, nilai tersebut menjadi *baseline* strategis yang menunjukkan bahwa akselerasi pelestarian budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan sangat progresif meskipun belum memiliki perbandingan historis dengan tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan ini menempatkan pembangunan kebudayaan daerah pada lintasan yang tepat menuju target jangka menengah, di mana realisasi saat ini telah memenuhi sekitar 86,00 Persen dari target akhir RPJMD 2030 yang ditetapkan sebesar 72,00. Dengan sisa gap kinerja yang relatif kecil, capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan dalam memperkuat jati diri dan ketahanan sosial budaya masyarakat, sekaligus memberikan optimisme tinggi bahwa target jangka panjang dapat tercapai lebih awal melalui konsistensi program perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan.

d. Analisis Realisasi terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lain dan Nasional

Grafik 3.9 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan



Capaian **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 61,94 menunjukkan daya saing yang sangat kompetitif di tingkat regional, menempatkan daerah pada peringkat ke-4 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi ini berada di atas rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat sebesar 61,64, yang mengindikasikan bahwa akselerasi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap akumulasi skor indeks kebudayaan di tingkat provinsi. Posisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi budaya lokal di tengah persaingan antarwilayah yang cukup ketat.

Secara spasial di wilayah Banua Enam, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memimpin pada urutan kedua sebagai daerah dengan skor IPK tertinggi setelah Tabalong (62,49), dan mengungguli kabupaten tetangga seperti Hulu Sungai Utara (61,84), Balangan (61,67), Hulu Sungai Tengah (61,45), dan Tapin (60,56). Keunggulan komparatif ini menegaskan efektivitas kebijakan daerah dalam perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan, sehingga mampu menjadi barometer bagi pembangunan karakter dan ketahanan sosial budaya di wilayah Hulu Sungai. Dengan berada di jajaran papan atas (Top 4) di Kalimantan

Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki fondasi yang kuat untuk terus memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan manusia secara makro.

e. Analisis Faktor Pendorong/Penghambat Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan implementasi program kebudayaan di daerah tercermin pada capaian IPK tahun berjalan yang mencapai 61,94, sebuah angka yang secara signifikan berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 61,64. Capaian impresif ini didorong oleh performa unggul pada Dimensi Pendidikan (71,44) dan Dimensi Gender (64,85), yang menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu daerah dengan kinerja kebudayaan terbaik di tingkat provinsi. Sinergi antara pelestarian nilai tradisi dan penguatan kompetensi sosial ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meletakkan fondasi jati diri bangsa yang kuat guna mendukung akselerasi pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun Analisis Faktor Pendorong/Penghambat Kinerja serta Alternatif Solusi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

- Kabupaten HSS memiliki keunggulan kompetitif pada Dimensi Pendidikan (D2) dengan skor 71,44 dan Dimensi Gender (D7) sebesar 64,85, di mana keduanya melampaui capaian rata-rata provinsi.
- Secara regional, HSS menjadi barometer pembangunan kebudayaan dengan skor tertinggi kedua di antara kabupaten lain di wilayah Hulu Sungai.
- Secara historis, capaian IPK Kalimantan Selatan hampir selalu berada di atas rata-rata nasional (kecuali pada tahun 2020), yang memberikan ekosistem pendukung yang kuat bagi pembangunan kebudayaan di level kabupaten.

Faktor Penghambat:

- Capaian HSS pada Dimensi Budaya Literasi (D6) sebesar 78,42 masih berada di bawah rata-rata capaian provinsi yang menyentuh angka 79,36.
- Sejalan dengan tren provinsi, skor pada Dimensi Ekonomi Budaya (D1) sebesar 28,93 dan Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya (D5) sebesar 25,84 tergolong sangat rendah secara absolut.
- Selisih antara capaian daerah dengan rata-rata nasional/provinsi yang sangat tipis menunjukkan kerentanan posisi daya saing jika tidak dilakukan upaya peningkatan yang berkelanjutan.

Alternatif Solusi:

- Mengingat Kabupaten HSS tertinggal di dimensi ini dibanding provinsi, perlu dilakukan penguatan akses terhadap bahan bacaan dan optimalisasi peran perpustakaan atau taman bacaan masyarakat.
- Diperlukan program yang lebih masif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku seni yang memiliki nilai ekonomi, serta memperluas ruang publik untuk ekspresi budaya.
- Menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda Indonesia Emas 2045, khususnya pada Misi ke-5 tentang Ketahanan Sosial Budaya, dengan target IPK nasional sebesar 68,15.
- Terus mendorong peningkatan kualitas pendidik di bidang muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian untuk memperkuat fondasi kebudayaan sejak dini.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan akumulasi dari efektivitas berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal

Sasaran “Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal” di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan pilar strategis yang secara langsung menunjang keberhasilan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu indikator utama pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya Lokal yang Diikutsertakan Dalam Festival (Persen)	40,00	40,00	100	3.342.886.600	2.822.849.885	84,44

Realisasi indikator Persentase Budaya Lokal yang Diikutsertakan Dalam Festival menunjukkan ketepatan perencanaan dengan realisasi fisik yang mencapai target sempurna sebesar 100 persen, atau setara dengan 40,00 persen budaya lokal yang berhasil difasilitasi dalam ajang promosi. Capaian fisik yang tuntas ini dibarengi dengan efisiensi anggaran yang sangat baik, di mana penyerapan keuangan hanya sebesar 84,44 persen atau senilai Rp. 2.822.849.885 dari total pagu Rp. 3.342.886.600. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen publikasi dan festival kebudayaan telah dilaksanakan secara efektif, mampu mencapai target jangkauan promosi secara optimal tanpa harus menghabiskan seluruh pagu anggaran yang tersedia. Adapun capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggar aan Seni Budaya (Kegiatan)	4	4	100	3.342.886.600	2.822.849.885	84,44
Sub Kegiatan							
Pelindungan , Pengemban gan, Pemanfaata n Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Seni Budaya (Objek)	10	10	100	3.342.886.600	2.822.849.885	84,44

1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota berhasil mencapai target fisik secara sempurna sebesar 100 persen dengan merealisasikan seluruh target 4 kegiatan fasilitasi penyelenggaraan seni budaya yang direncanakan. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pengelolaan anggaran yang

sangat efisien, di mana realisasi keuangan tercatat sebesar 84,44 Persen atau senilai Rp. 2.822.849.885 dari total alokasi pagu sebesar Rp. 3.342.886.600. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyediakan ruang ekspresi bagi masyarakat pelaku seni budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara efektif dan akuntabel, sekaligus membuktikan adanya optimalisasi penggunaan sumber daya finansial yang tepat sasaran untuk mendukung pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan telah berhasil menuntaskan seluruh target fisiknya sebesar 100 persen melalui pengadaan 10 objek sarana dan prasarana pendukung seni budaya. Keberhasilan penguatan infrastruktur budaya ini dicapai dengan tingkat efisiensi anggaran yang sangat baik, di mana realisasi keuangan hanya sebesar 84,44 persen atau senilai Rp. 2.822.849.885 dari total pagu Rp. 3.342.886.600. Capaian ini menegaskan komitmen Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi ekosistem seni budaya secara akuntabel, di mana penghematan anggaran sebesar 15,56 persen menunjukkan adanya manajemen pengadaan yang optimal tanpa mengurangi kuantitas target objek yang telah ditetapkan.

Gambar 3.19 Kegiatan Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal





2. Meningkatnya Partisipasi Pelaku Seni Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah

Sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pelaku Seni Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah” merupakan faktor penunjang kedua yang krusial dalam mengakselerasi skor Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya pada dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya dan Ekonomi Budaya. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pelaku Seni Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelaku Seni yang Aktif Dalam Pelestarian Budaya (Persen)	0,75	0,77	102,67	1.009.331.500	838.088.072	83,03

Realisasi Indikator Persentase Pelaku Seni yang Aktif Dalam Pelestarian Budaya mencatatkan kinerja yang melampaui target fisik dengan capaian sebesar 102,67 persen atau terealisasi sebanyak 0,77 persen dari total populasi yang disasar. Prestasi yang melebihi sasaran ini diraih dengan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi, yakni hanya menyerap 83,03 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 838.088.072 dari total alokasi dana sebesar Rp. 1.009.331.500. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pola pembinaan komunitas seni di daerah telah berhasil

meningkatkan gairah partisipasi aktif para pelaku seni secara produktif dengan biaya operasional yang sangat terkendali dan tepat sasaran. Adapun capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pelaku Seni Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pertunjukan Seni Yang Tampil Dalam Event Festival (Kegiatan)	4	4	100	1.009.331.500	838.088.072	83,03
Sub Kegiatan							
Pelindungan , Pengemban gan, Pemanfaata n Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	5	100	1.009.331.500	838.088.072	83,03

1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota telah berhasil mencapai target fisik secara sempurna sebesar 100 persen dengan merealisasikan seluruh target 4 pertunjukan seni yang tampil dalam event festival. Keberhasilan ini didukung oleh tingkat efisiensi anggaran yang sangat baik, di mana realisasi keuangan tercatat sebesar 83,03 Persen atau senilai Rp. 838.088.072 dari total alokasi Rp. 1.009.331.500. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan kegiatan dalam mengaktivasi ekosistem kesenian tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara akuntabel, di mana penghematan anggaran sebesar 16,97 persen berhasil dicapai tanpa mengurangi kuantitas

pementasan seni yang direncanakan untuk pelestarian budaya daerah. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya mencatatkan keberhasilan fisik yang sempurna sebesar 100 persen dengan merealisasikan peningkatan kapasitas pada 5 lembaga kesenian tradisional. Keberhasilan penguatan kelembagaan seni ini dicapai melalui pengelolaan anggaran yang sangat efisien, di mana realisasi keuangan hanya sebesar 83,03 persen atau senilai Rp. 838.088.072 dari total pagu Rp. 1.009.331.500. Hal ini menunjukkan adanya optimalisasi kegiatan pembinaan lembaga kesenian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara akuntabel, di mana penghematan anggaran sebesar hampir 17 Persen berhasil diraih tanpa mengurangi kuantitas maupun target pengembangan kapasitas lembaga yang telah ditetapkan.

Gambar 3.20 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Pelaku Seni Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah



3. Meningkatnya Pelestarian Obyek Warisan Budaya

Sasaran “Meningkatnya Pelestarian Obyek Warisan Budaya” merupakan pilar penunjang ketiga yang sangat vital dalam memperkuat Dimensi Warisan Budaya (D4) pada struktur Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Obyek Warisan Budaya

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Obyek Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persen)	100	100	100	2.960.237.465	2.193.190.413	74,09

Realisasi Indikator Persentase Obyek Warisan Budaya yang Dilestarikan pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mencatatkan capaian kinerja fisik yang sempurna sebesar 100 persen, di mana seluruh target objek warisan budaya yang direncanakan telah berhasil dilestarikan sepenuhnya. Keberhasilan fisik ini dibarengi dengan tingkat efisiensi anggaran yang sangat signifikan, di mana realisasi keuangan hanya menyerap sebesar 74,09 persen atau senilai Rp. 2.193.190.413 dari total alokasi pagu sebesar Rp. 2.960.237.465. Hal ini menunjukkan adanya manajemen perlindungan obyek warisan budaya yang sangat efektif dan ekonomis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana penghematan anggaran sebesar 25,91 persen berhasil dicapai tanpa mengurangi kuantitas maupun kualitas pemenuhan target pelestarian cagar budaya daerah yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pelestarian Obyek Warisan Budaya

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Juru Pelihara & Pengelola Obyek Warisan Budaya yang	34	34	100	2.702.674.476	1.743.190.413	64,50

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Kompeten (Orang)						
	Jumlah Obyek Warisan Budaya yang Dipelihara (Objek)	34	34	100	155.268.589	80.400.450	51,78
Sub Kegiatan							
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Juru Pelihara yang Ditempatkan Pada Obyek Warisan Budaya (Orang)	34	34	100	2.702.674.476	1.743.190.413	64,50
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	34	34	100	155.268.589	80.400.450	51,78

1) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Realisasi kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota secara keseluruhan menunjukkan performa yang sangat impresif dengan keberhasilan mencapai target fisik sebesar 100 Persen pada seluruh indikatornya. Pemenuhan 34 orang SDM juru pelihara yang kompeten serta pemeliharaan 34 objek warisan budaya berhasil dituntaskan secara sempurna, yang membuktikan bahwa komitmen perlindungan aset sejarah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan sesuai rencana kerja yang ditetapkan.

Aspek yang paling menonjol dari kegiatan ini adalah tingkat efisiensi anggarannya yang luar biasa tinggi. Pengelolaan SDM hanya menyerap 64,50 persen atau Rp. 1.743.190.413 dari alokasi anggaran Rp. 2.702.674.476, sementara pemeliharaan objek fisik bahkan lebih hemat dengan realisasi hanya sebesar 51,78 persen atau senilai Rp. 80.400.450 dari pagu Rp. 155.268.589 yang disediakan. Capaian ini mengindikasikan adanya manajemen operasional yang sangat ekonomis dan akuntabel, di mana perlindungan menyeluruh terhadap cagar budaya dapat diselesaikan secara tuntas dengan menyisakan ruang anggaran yang cukup signifikan untuk

optimalisasi program kebudayaan lainnya di masa mendatang. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelindungan Cagar Budaya performa fisik yang sempurna sebesar 100 persen dengan menempatkan seluruh 34 orang tenaga juru pelihara pada obyek warisan budaya yang telah ditentukan. Hal yang paling menarik adalah tingkat efisiensi anggarannya yang mencapai 35,50 persen, di mana realisasi keuangan hanya sebesar Rp. 1.743.190.413 dari pagu Rp. 2.702.674.476. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa manajemen penempatan dan pengupahan tenaga pelestari sejarah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dikelola secara sangat efektif, memastikan setiap situs memiliki "penjaga" tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi dana operasional yang tersedia.
- Pengembangan Cagar Budaya menunjukkan efisiensi yang luar biasa impresif. Dengan target fisik yang tuntas 100 persen dan berhasil mengembangkan 34 obyek cagar budaya, realisasi anggaran yang digunakan hanya sebesar 51,78 persen atau senilai Rp. 80.400.450. Keberhasilan menyelesaikan seluruh target pengembangan dengan hanya menggunakan hampir separuh dari anggaran yang dialokasikan Rp. 155.268.589 membuktikan adanya inovasi teknis atau skema swakelola yang sangat ekonomis namun tetap mampu memenuhi standar kualitas pengembangan warisan budaya daerah secara akuntabel.

Gambar 3.21 Kegiatan Peningkatan Pelestarian Obyek Warisan Budaya





4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Permuseuman

Sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Permuseuman” merupakan pilar penunjang keempat yang strategis dalam mengakselerasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya pada dimensi budaya literasi dan pendidikan. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Permuseuman

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Masyarakat Ke Museum (Persen)	30,89	30,91	100	789.567.297	671.856.924	85,09

Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Masyarakat Ke Museum berhasil dipenuhi secara presisi dengan capaian kinerja fisik mencapai 100 persen, di mana realisasi kunjungan tercatat sebesar 30,91 persen dari target 30,89 persen. Aktivasi museum sebagai pusat edukasi dan rekreasi publik ini didukung oleh penyerapan anggaran yang akuntabel sebesar 85,09 persen atau senilai Rp. 671.856.924 dari pagu Rp. 789.567.297. Keberhasilan mencapai target kunjungan sesuai proyeksi ini membuktikan bahwa strategi komunikasi dan pengelolaan fasilitas permuseuman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan efektif dalam menarik minat masyarakat luas untuk mengapresiasi warisan budaya daerah. Adapun capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Permuseuman

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kerjasama Kemitraan Museum (Kegiatan)	3	3	100	630.838.000	595.110.774	94,34
	Persentase Sarana dan Prasarana Museum yang Terpenuhi (Persen)	42,86	42,86	100	158.729.297	76.746.150	48,35
Sub Kegiatan							
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Kegiatan Workshop Permuseuman (Kegiatan)	3	3	100	630.838.000	595.110.774	94,34
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kegiatan Edukasi Sejarah dan Permuseuman (Kegiatan)	11	11	100	383.760.000	367.748.200	95,83
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Bangunan Museum yang Dipelihara (Unit)	1	1	100	158.729.297	76.746.150	48,35

1) Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota secara keseluruhan menunjukkan kinerja fisik yang sempurna dengan capaian 100 persen pada seluruh indikatornya. Indikator Jumlah Kegiatan Kerjasama Kemitraan Museum berhasil merealisasikan 3 kegiatan sesuai target dengan penyerapan anggaran yang optimal sebesar 94,34 persen atau senilai Rp. 595.110.774 dari Rp. 630.838.000 pagu yang tersedia, yang mencerminkan

pemanfaatan dana secara maksimal untuk memperkuat jejaring kemitraan museum.

Hal yang paling menonjol dari kegiatan ini adalah tingkat efisiensi luar biasa pada indikator Persentase Sarana dan Prasarana Museum yang Terpenuhi. Meskipun target fisik sebesar 42,86 persen tercapai sepenuhnya, realisasi keuangan yang digunakan hanya sebesar 48,35 persen atau senilai Rp. 76.746.150 dari total pagu Rp. 76.746.150. Penghematan anggaran mencapai lebih dari 51 persen ini menunjukkan adanya manajemen pengadaan atau pemeliharaan sarana museum yang sangat efektif dan ekonomis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana seluruh kebutuhan infrastruktur yang direncanakan dapat dipenuhi dengan biaya yang jauh lebih rendah dari estimasi awal. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu mencatatkan kinerja fisik yang tuntas sebesar 100 persen dengan keberhasilan melaksanakan 3 kegiatan workshop permuseuman sesuai rencana. Realisasi anggaran pada aspek ini mencapai 94,34 persen atau senilai Rp. 595.110.774 dari total pagu Rp. 630.838.000 yang disediakan. Tingginya serapan anggaran yang dibarengi dengan pemenuhan target fisik ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi pengelolaan koleksi museum telah dieksekusi secara intensif dan optimal guna menjamin standar pelindungan benda cagar budaya yang disimpan di museum.
- Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum menunjukkan produktivitas yang sangat tinggi dalam aspek edukasi publik. Target fisik sebanyak 11 kegiatan edukasi sejarah dan permuseuman berhasil direalisasikan sepenuhnya 100 persen dengan dukungan serapan anggaran yang sangat akuntabel sebesar 95,83 Persen atau senilai Rp. 367.748.200 dari pagu Rp. 383.760.000. Kedekatan antara realisasi fisik dan keuangan ini membuktikan bahwa program perluasan akses informasi sejarah bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah direncanakan secara presisi dan dijalankan secara tuntas untuk mendorong literasi budaya.

- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum, Sub kegiatan ini menonjol sebagai area dengan tingkat efisiensi anggaran paling luar biasa di sektor permuseuman. Meskipun target fisik pemeliharaan 1 unit bangunan museum tercapai secara sempurna yaitu 100 persen, realisasi keuangan yang digunakan hanya sebesar 48,35 persen atau senilai Rp. 76.746.150 dari total alokasi Rp. 158.729.297. Penghematan anggaran yang mencapai lebih dari 51 Persen ini mengindikasikan manajemen pemeliharaan infrastruktur yang sangat efektif dan ekonomis, di mana kelayakan bangunan museum tetap terjaga optimal dengan biaya yang jauh lebih rendah dari estimasi awal.

Gambar 3.22 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Permuseuman



5. Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah

Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Dan Pelestarian Sejarah” merupakan pilar penunjang kelima yang sangat strategis dalam memperkuat capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya pada dimensi pendidikan dan

ketahanan budaya. Adapun sasaran ini ditunjang oleh program dan indikator berikut:

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Kegiatan Pembinaan Sejarah yang Terlaksana Sesuai Standar (Persen)	100	100	100	102.294.400	102.294.400	100

Realisasi Indikator Persentase Kegiatan Pembinaan Sejarah yang Terlaksana Sesuai Standar mencerminkan integritas pelaksanaan program yang sangat disiplin dengan capaian fisik sempurna sebesar 100 persen. Program ini menunjukkan ketepatan perencanaan yang absolut, di mana realisasi keuangan tercatat identik dengan alokasi anggaran, yakni sebesar 100 persen atau senilai Rp. 102.294.400. Ketajaman sinkronisasi antara target kualitas, pemenuhan standar kegiatan, dan serapan dana ini menegaskan bahwa pembinaan nilai-nilai historis daerah telah dieksekusi secara tuntas dan sesuai dengan parameter teknis yang direncanakan tanpa adanya deviasi anggaran. Adapun capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan							
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Lawatan Sejarah yang Dilaksanakan (Kegiatan)	6	6	100	102.294.400	102.294.400	100
Sub Kegiatan							
Peningkatan Akses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi	1	1	100	102.294.400	102.294.400	100

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)						

1) Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat akurasi perencanaan dan disiplin eksekusi yang luar biasa tinggi dengan capaian kinerja fisik sempurna sebesar 100 persen. Seluruh target 6 kegiatan lawatan sejarah berhasil direalisasikan secara tuntas, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkokoh jati diri masyarakat melalui pengenalan nilai-nilai historis secara langsung di lapangan. Hal yang sangat menonjol dari kegiatan ini adalah ketepatan realisasi keuangan yang juga mencapai 100 persen atau senilai Rp. 102.294.400, identik dengan alokasi pagu yang disediakan. Keselarasan mutlak antara target kuantitas kegiatan dan serapan dana ini membuktikan bahwa program pembinaan sejarah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah didesain secara sangat matang dan dijalankan secara akuntabel tanpa adanya deviasi anggaran, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi pelestarian memori kolektif daerah. Adapun uraian sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah mencatatkan tingkat akurasi perencanaan yang sangat presisi dengan capaian kinerja fisik yang tuntas sebesar 100 persen. Keberhasilan dalam menyediakan 1 dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses oleh publik ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat literasi sejarah dan keterbukaan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal yang paling menonjol dari sub kegiatan ini adalah keselarasan mutlak antara realisasi keuangan dan alokasi anggaran yang mencapai 100 persen atau senilai Rp. 102.294.400, yang membuktikan bahwa seluruh sumber daya finansial telah dikelola secara optimal dan

disiplin untuk menghasilkan output informasi sejarah yang akuntabel tanpa adanya deviasi anggaran sedikit pun.

**Gambar 3.23 Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan
Pembinaan dan Pelestarian Sejarah**



3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya merupakan refleksi dari komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menerapkan prinsip Value for Money, yakni pencapaian output yang maksimal dengan penggunaan input (anggaran) yang paling optimal.

Analisis efisiensi dalam Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian kinerja terhadap tingkat capaian realisasi anggaran pada masing-masing program. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana output dan outcome yang dihasilkan sebanding atau lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penggunaan sumber daya yang dialokasikan.

Efisiensi dinilai tercapai apabila persentase capaian kinerja lebih tinggi atau sebanding dengan persentase realisasi anggaran. Metode ini digunakan sebagai bagian dari analisis akuntabilitas kinerja sebagaimana dipraktikkan dalam evaluasi SAKIP.

Menghitung Efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = CK - CA$$

Keterangan:

- E = Efisiensi
- CK = Capaian Kinerja (%)
- CA = Capaian Realisasi Anggaran (%)

Interpretasi:

- Jika $E > 0 \rightarrow$ Efisien
- Jika $E = 0 \rightarrow$ Proporsional
- Jika $E < 0 \rightarrow$ Tidak Efisien

Selanjutnya menghitung nilai efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = \frac{E + 100}{2}$$

Keterangan:

- NE = Nilai Efisiensi
- Nilai ≥ 50 dikategorikan efisien
- Nilai < 50 dikategorikan kurang/tidak efisien

Tabel 3.29 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1	Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan	70,95	97,83	26,88	63,440	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	91,82	104,81	12,99	56,495	Efisien
3	Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	80,55	109,53	28,98	64,490	Efisien

Secara keseluruhan, seluruh sasaran strategis berada pada kategori "Efisien", yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan anggaran untuk menghasilkan capaian kinerja yang melampaui atau mendekati target. Berikut adalah rincian per sasaran:

- a) Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan (Sasaran 1): Sasaran ini menunjukkan tingkat penghematan anggaran yang paling tinggi, dengan realisasi keuangan hanya sebesar 70,95 persen. Dengan sisa anggaran hampir 30 persen, organisasi tetap mampu mengamankan capaian kinerja fisik yang sangat tinggi sebesar 97,83 persen. Tingkat efisiensi sebesar 26,88 ini membuktikan bahwa perluasan akses pendidikan telah dikelola secara sangat ekonomis melalui ketepatan alokasi dan efektivitas operasional di lapangan.
- b) Meningkatnya Kualitas Pendidikan (Sasaran 2): Meskipun memiliki nilai efisiensi terendah di antara ketiganya 12,99, sasaran ini tetap masuk kategori Efisien dengan catatan yang impresif. Realisasi keuangan sebesar 91,82 persen mampu menghasilkan capaian kinerja melebihi target 104,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi anggaran yang lebih besar pada peningkatan kualitas pendidikan berbanding lurus dengan produktivitas hasil yang melampaui ekspektasi awal.
- c) Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah (Sasaran 3): Sasaran ini merupakan performa terbaik dalam hal efisiensi dengan nilai mencapai 28,98. Meskipun hanya menyerap anggaran sebesar 80,55 persen, capaian kinerjanya justru melampaui target secara signifikan, yakni sebesar 109,53 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa program kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil dijalankan dengan metode yang sangat hemat biaya namun menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dari yang diproyeksikan.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 (Matrik Tindak Lanjut 2024)

Tabel 3.30 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Perangkat Daerah agar memastikan pohon kinerja telah sesuai dengan isu strategis sebagai dasar perencanaan 2025-2029 serta memastikan penjenjangan kinerja telah diimplementasikan secara konsisten dalam SIPD pada seluruh Program, Kegiatan dan Subkegiatan	1. Melakukan review pohon kinerja sesuai isu strategis daerah 2. Mengintegrasikan pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan 2025–2029. 3. Memastikan penjenjangan kinerja diimplementasikan secara konsisten dalam SIPD pada seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Telah Dilaksanakan
2	Mengupdate secara berkala capaian kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi e-SAKIP dengan data dukung yang lengkap dan valid	1. Melakukan update capaian kinerja per triwulan 2. Mengumpulkan & memverifikasi data dukung tiap bidang. 3. Menginput capaian kinerja dan data dukung ke aplikasi e-SAKIP. 4. Validasi internal data secara berkala.	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Telah Dilaksanakan
3	Perangkat Daerah agar melaporkan hasil kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan analisis, bukti dukung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut pada aplikasi e-SAKIP untuk mencapai pemenuhan target kinerja	1. Memberikan analisis capaian kinerja, faktor pendukung, dan penghambat tiap triwulan pada aplikasi e-SAKIP. 2. Menyusun rencana tindak lanjut capaian yang belum sesuai target.	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Telah Dilaksanakan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
4	Perangkat Daerah agar mengakses dan memantau e-SAKIP secara berkala untuk memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan rencana tindak lanjut yang disertai revidi secara berjenjang oleh internal Perangkat Daerah terhadap efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan dan disesuaikan bila diperlukan	1. Melaksanakan revidi internal berjenjang (Kabid → Sekretaris → Kepala Dinas) secara berkala.	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Telah Dilaksanakan

3.5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja/Rencana Tindak Lanjut di Tahun 2026

Tabel 3.31 Rencana Tindak Lanjut

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/RTL
Kemudahan Aksesibilitas Pendidikan Menjangkau Semua Kalangan	Angka Partisipasi Sekolah	ketidaksinkronan basis data kependudukan dengan laporan satuan pendidikan (Dapodik/EMIS), mengingat secara faktual seluruh anak usia tersebut telah bersekolah	Melaksanakan rekonsiliasi data terpadu antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Membangun sistem integrasi data real-time (dashboard pemantauan) antara Dapodik dan SIAK untuk mendeteksi anak usia sekolah yang belum terinput, serta memperkuat Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
		Adanya sedikit pergeseran partisipasi pada kelompok usia wajib belajar dasar dari 99,89	Menertibkan administrasi bagi seluruh satuan pendidikan dalam menginput data peserta didik pada	Mengembangkan aplikasi atau sistem peringatan dini (early warning system) pada tingkat satuan pendidikan untuk mencegah potensi

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/RTL
		persen menjadi 99,15 persen	sistem Data Pokok Pendidikan	putus sekolah sejak dini.
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik	Masih rendahnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan serta kualitas pelatihan guru	Mengimplementasikan Supervisi Kelas Berbasis Dampak untuk 101 Satuan Pendidikan kategori "Sedang" pada kualitas pembelajaran dengan mentransformasi peran pengawas sekolah dari sekadar pemeriksa administrasi menjadi observer praktik mengajar di kelas (penerapan teori PMM)	Melembagakan praktik "Komunitas Belajar Antar Sekolah" di mana 101 satuan pendidikan kategori "Sedang" didampingi oleh sekolah penggerak untuk konsistensi transformasi peran pengawas sebagai mentor instruksional
		Capaian literasi dan numerasi kategori baik baru mencapai 50 persen dari seluruh satuan pendidikan	Melakukan Fokus Intervensi Intensif untuk 41 Satuan Pendidikan kategori "Kurang" melalui pendampingan asimetris dan penguatan modul literasi-numerasi khusus bagi sekolah dengan rapor merah	Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan guru berbasis Problem Based Learning yang berfokus pada strategi literasi-numerasi lintas mata pelajaran, bukan sekadar penugasan mandiri di PMM
		Menurunnya skor iklim kebinekaan	Melakukan Revitalisasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melalui pengayaan tema kebinekaan dan toleransi untuk menghentikan degradasi rasa kebangsaan untuk 137 Satuan	Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam modul P5 secara lebih mendalam

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/RTL
			Pendidikan yang mengalami penurunan skor Iklim Kebinekaan	
Meningkatnya Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Kabupaten HSS memiliki keunggulan kompetitif pada Dimensi Pendidikan (D2) dengan skor 71,44 dan Dimensi Gender (D7) sebesar 64,85, di mana keduanya melampaui capaian rata-rata provinsi		Melakukan standarisasi dan dokumentasi praktik baik (best practice) pada Dimensi Pendidikan dan Gender sebagai benchmark nasional, sembari mempertahankan kebijakan inklusivitas yang sudah berjalan
		Capaian HSS pada Dimensi Budaya Literasi (D6) sebesar 78,42 masih berada di bawah rata-rata capaian provinsi yang menyentuh angka 79,36	Penguatan akses terhadap bahan bacaan dan optimalisasi peran perpustakaan atau taman bacaan masyarakat	Membuat Pojok Baca di ruang-ruang publik dan fasilitas umum lainnya, serta memperbanyak kompetisi literasi berbasis komunitas untuk mengejar ketertinggalan skor dari rata-rata provinsi
		Sejalan dengan tren provinsi, skor pada Dimensi Ekonomi Budaya (D1) sebesar 28,93 dan Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya (D5) sebesar 25,84 tergolong sangat rendah secara absolut	Meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku seni yang memiliki nilai ekonomi, serta memperluas ruang publik untuk ekspresi budaya	Menyusun skema insentif bagi kelompok seni (hibah atau fasilitasi pemasaran produk budaya) dan menambah kalender event kebudayaan tahunan yang melibatkan UMKM berbasis budaya guna mendongkrak

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/RTL
				Dimensi Ekonomi Budaya dan Ekspresi secara signifikan

3.6 Realisasi Anggaran

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari dukungan alokasi fiskal yang dikelola secara pruden dan akuntabel yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai instrumen vital dalam menggerakkan roda pembangunan daerah, anggaran belanja bukan sekadar angka penyerapan, melainkan manifestasi dari komitmen pemerintah daerah untuk mentransformasikan sumber daya finansial menjadi layanan publik yang berkualitas di sektor pendidikan dan kebudayaan.

Sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Kemudian, peraturan tersebut mengalami perubahan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penjabaran anggaran ini tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, peraturan tersebut mengalami perubahan menjadi Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024. Selanjutnya di tetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran pada tahun ini diarahkan sepenuhnya untuk mendukung tiga sasaran strategis utama: perluasan aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta pelestarian warisan budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seluruh aktivitas belanja dijalankan dengan

menjunjung tinggi prinsip *Value for Money* yakni mengutamakan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak nyata dan nilai tambah bagi Masyarakat.

Tabel 3.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI	343.672.083.574	303.850.009.057	88,41
Belanja Pegawai	288.081.167.598	255.929.655.956	88,83
Belanja Barang dan Jasa	41.078.508.551	34.587.157.466	84,19
Belanja Hibah	14.512.407.425	13.333.195.635	91,87
BELANJA MODAL	61.691.028.586	43.348.669.985	70,26
Tanah	15.406.500.000	0	0
Peralatan dan Mesin	10.346.693.436	9.804.488.494	94,75
Gedung dan Bangunan	33.158.324.000	30.776.162.041	92,81
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.779.511.150	2.768.019.450	99,58
TOTAL	405.363.112.160	347.198.679.042	85,65

Realisasi anggaran pada tahun ini mencatatkan angka 85,65 persen atau senilai Rp. 303.850.009.057 dari total pagu yang dialokasikan yaitu Rp. 343.672.083.574. Capaian ini didominasi oleh performa Belanja Operasi yang menyerap 88,41 persen anggaran, di mana Belanja Hibah menjadi komponen tertinggi dengan serapan 91,87 persen. Efisiensi yang terlihat pada Belanja Pegawai 88,83 Persen dan Belanja Barang dan Jasa 84,19 persen menunjukkan bahwa operasional rutin organisasi dan pemberian dukungan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal tanpa menghabiskan seluruh pagu, mencerminkan manajemen belanja yang pruden dan akuntabel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Di sisi lain, Belanja Modal menunjukkan kontras performa yang menarik dengan total serapan sebesar 70,26 persen. Meskipun angka akumulatif tersebut terlihat moderat, sektor pembangunan fisik dan pengadaan sarana mencatatkan keberhasilan luar biasa, seperti Belanja Aset Tetap Lainnya yang mencapai 99,58

persen, Peralatan dan Mesin 94,75 persen, serta Gedung dan Bangunan sebesar 92,81 persen. Rendahnya total belanja modal murni disebabkan oleh tidak terealisasinya pengadaan Tanah yaitu 0 Persen senilai Rp. 15.406.500.000, yang menjadi hambatan administratif utama di tengah tuntasnya proyek-proyek infrastruktur pendidikan dan kebudayaan lainnya secara tepat waktu.

Secara keseluruhan, analisis ini membuktikan penerapan prinsip *Value for Money* yang konsisten, di mana target-target fisik tetap mampu diselesaikan secara tuntas meski terdapat sisa anggaran yang signifikan. Efisiensi sebesar 14,35 persen dari total pagu bukan menunjukkan kegagalan program, melainkan hasil dari penghematan belanja operasional serta hambatan spesifik pada pengadaan lahan yang tidak mengganggu jalannya pembangunan gedung dan pengadaan peralatan sekolah. Hal ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang terserap telah dikonversi secara efektif menjadi layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terinci pada tabel berikut:

**Tabel 3.33 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2025**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	293.807.855.449	258.523.580.309	87,99
Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9.769.600	9.100.000	93,15
Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.663.500	5.250.000	92,70
Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.106.100	3.850.000	93,76
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	290.574.598.310	255.939.098.054	88,08
Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn	290.571.260.598	255.935.834.054	88,08
Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1.466.000	1.420.000	96,86
Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	935.856	922.000	98,52

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
Sub Kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	935.856	922.000	98,52
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1.256.863.439	1.212.923.175	96,50
Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	516.439.639	493.548.450	95,57
Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	92.000.000	74.983.000	81,50
Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.423.800	51.110.000	95,67
Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	595.000.000	593.281.725	99,71
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.039.056.100	617.882.080	59,47
Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	500.000	-	0,00
Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	256.598.100	146.734.909	57,18
Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48.800.000	48.544.000	99,48
Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	733.158.000	422.603.171	57,64
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	927.568.000	744.577.000	80,27
Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	27.100.000	11.270.000	41,59
Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	900.468.000	733.307.000	81,44
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	105.943.326.849	82.695.137.707	78,06
Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar	61.164.550.995	45.097.041.316	73,73
Sub Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	7.687.302.000	7.637.800.376	99,36
Sub Kegiatan pengadaan mebel sekolah	1.314.650.000	1.309.210.000	99,59
Sub Kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	195.014.500	163.825.000	84,01
Sub Kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	3.992.500.000	3.497.500.000	87,60

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
Sub Kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	266.991.000	130.785.000	48,98
Sub Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	77.213.600	20.150.000	26,10
Sub Kegiatan pengelolaan dana bos sekolah dasar	15.803.340.000	15.801.340.000	99,99
Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	39.761.200	-	0,00
Sub Kegiatan pengadaan perlengkapan siswa	18.793.067.495	3.690.860.000	19,64
Sub Kegiatan rehabilitasi sedangberat ruang kelas	10.708.850.000	10.628.255.021	99,25
Sub Kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	-	-	0,00
Sub Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.920.021.000	1.893.590.419	98,62
Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.341.800	10.340.000	99,98
Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	15.951.800	4.000.000	25,08
Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	39.761.200	16.940.000	42,60
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.951.800	15.800.000	99,05
Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10.971.800	5.790.000	52,77
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	35.760.000	35.760.000	100,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	15.951.800	15.770.000	98,86
Sub Kegiatan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	37.050.000	36.637.600	98,89
Sub Kegiatan rehabilitasi sedangberat ruang guru, kepala sekolah, TU	102.050.000	101.550.400	99,51
Sub Kegiatan pembangunan laboratorium sekolah dasar	82.050.000	81.137.500	98,89
Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	23.867.999.203	20.001.259.333	83,80
Sub Kegiatan pembangunan laboratorium	794.920.000	793.169.473	99,78

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
Sub Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	1.398.700.000	1.398.271.266	99,97
Sub Kegiatan rehabilitasi sedangberat ruang kelas sekolah	2.155.090.000	2.085.475.053	96,77
Sub Kegiatan rehabilitasi sedangberat perpustakaan sekolah	455.250.000	410.644.189	90,20
Sub Kegiatan rehabilitasi sedangberat laboratorium	1.704.600.000	1.687.995.628	99,03
Sub Kegiatan rehabilitasi sedangberat ruang serba guna aula	503.200.000	497.794.919	98,93
Sub Kegiatan rehabilitasi sedangberat sarana prasarana dan utilitas sekolah	2.365.100.000	2.273.176.211	96,11
Sub Kegiatan pengadaan mebel sekolah	225.000.000	223.443.000	99,31
Sub Kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	-	-	0,00
Sub Kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	448.065.700	412.212.500	92,00
Sub Kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	978.000.000	724.500.000	74,08
Sub Kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	176.770.400	148.417.403	83,96
Sub Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	33.204.400	33.190.000	99,96
Sub Kegiatan pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama	7.366.580.000	7.366.580.000	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	124.700.600	98.535.000	79,02
Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.367.340.000	144.809.350	4,30
Sub Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa	775.000.000	774.999.948	100,00
Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	42.363.600	25.210.000	59,51
Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.831.800	5.830.000	99,97
Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.442.600	36.762.500	98,18
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	176.210.103	152.133.000	86,34

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12.278.700	10.552.500	85,94
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	452.510.000	432.461.393	95,57
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8.354.900	8.112.500	97,10
Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	261.486.400	256.983.500	98,28
Kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini paud	14.103.081.275	11.395.548.715	80,80
Sub Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas paud	1.381.442.000	1.364.202.553	98,75
Sub Kegiatan pengadaan perlengkapan paud	720.147.825	716.950.000	99,56
Sub Kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan paud	1.968.000.000	1.789.000.000	90,90
Sub Kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan paud	2.946.003.800	512.771.878	17,41
Sub Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen paud	17.421.200	17.300.000	99,30
Sub Kegiatan pengelolaan dana bop paud	4.409.376.000	4.381.859.000	99,38
Sub Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud	449.961.000	443.699.548	98,61
Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	18.890.900	18.000.000	95,28
Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	77.592.400	75.700.000	97,56
Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33.646.200	33.525.000	99,64
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.687.500	14.687.500	100,00
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	427.260.000	424.602.040	99,38
Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	110.441.250	103.875.000	94,05
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	18.921.200	-	0,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.509.290.000	1.499.376.196	99,34
Kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	6.807.695.376	6.201.288.343	91,09
Sub Kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	322.217.276	308.004.800	95,59
Sub Kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	2.473.200.000	1.884.500.000	76,20
Sub Kegiatan pengelolaan dana bop sekolah nonformal/kesetaraan	3.749.000.000	3.749.000.000	100,00
Sub Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	251.430.000	248.093.543	98,67
Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	11.848.100	11.690.000	98,67
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.352.218.100	3.660.937.957	84,12
Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupatenkota	3.342.886.600	2.822.849.885	84,44
Sub Kegiatan perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	3.342.886.600	2.822.849.885	84,44
Kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupatenkota	1.009.331.500	838.088.072	83,03
Sub Kegiatan perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	1.009.331.500	838.088.072	83,03
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	102.294.400	102.294.400	100,00
Kegiatan pembinaan sejarah lokal dalam 1 satu daerah kabupatenkota	102.294.400	102.294.400	100,00
Sub Kegiatan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	102.294.400	102.294.400	100,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.857.943.065	1.823.590.863	63,81
Kegiatan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupatenkota	2.857.943.065	1.823.590.863	63,81
Sub Kegiatan perlindungan cagar budaya	2.702.674.476	1.743.190.413	64,50
Sub Kegiatan pengembangan cagar budaya	155.268.589	80.400.450	51,78

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	789.567.297	671.856.924	85,09
Kegiatan pengelolaan museum kabupatenkota	789.567.297	671.856.924	85,09
Sub Kegiatan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	222.903.000	205.168.310	92,04
Sub Kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	24.175.000	22.194.264	91,81
Sub Kegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	383.760.000	367.748.200	95,83
Sub Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	158.729.297	76.746.150	48,35
TOTAL	407.853.205.160	347.477.398.160	85,20

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatatkan realisasi anggaran total sebesar 85,20 persen atau senilai Rp. 347.477.398.160 dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 407.853.205.160. Capaian ini mencerminkan tingkat penyerapan yang sangat pruden dan akuntabel, di mana organisasi mampu mengamankan jalannya program-program strategis pendidikan dan kebudayaan dengan sisa anggaran sebesar 14,80 persen atau senilai Rp. 60.375.807.000. Angka realisasi ini menunjukkan bahwa manajemen fiskal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap terjaga pada koridor yang sehat, menghindari pemborosan sekaligus memastikan ketersediaan likuiditas daerah untuk mendukung keberlanjutan layanan publik.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa gap sebesar 14,80 persen tersebut bukan merupakan indikator kegagalan operasional, melainkan dampak dari beberapa faktor efisiensi dan hambatan administratif spesifik. Sebagaimana terlihat pada rincian belanja, efisiensi signifikan terjadi pada pos Belanja Operasi dan optimalisasi sisa tender pada proyek infrastruktur fisik seperti pembangunan gedung dan pengadaan peralatan sekolah yang rata-rata mencapai target fisik 100 persen. Namun, penahan utama persentase realisasi total ini adalah pada komponen Belanja Tanah yang tidak terealisasi (0 persen), yang secara matematis memberikan

kontribusi besar terhadap akumulasi sisa anggaran di akhir tahun meskipun pembangunan fisik di atas lahan yang sudah ada tetap berjalan tuntas.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan ini membuktikan penerapan prinsip *Value for Money* yang sangat efektif. Dengan realisasi sekitar 85 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap mampu mencapai mayoritas target kinerja sasaran strategis, mulai dari peningkatan aksesibilitas hingga kualitas pendidikan dan pelestarian budaya. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari kemampuan mentransformasikan sumber daya finansial yang tersedia menjadi output layanan yang maksimal bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan biaya yang paling efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2025 menunjukkan performa yang Sangat Tinggi dan Akuntabel. Berdasarkan pengukuran terhadap 11 indikator sasaran strategis, organisasi berhasil mencatatkan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 104,76 persen. Keberhasilan ini tercermin dari melampauinya target-target makro seperti Angka Harapan Lama Sekolah 12,78 tahun dan Indeks Pembangunan Kebudayaan 61,94 yang menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada peringkat ke-4 se Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Nilai AKM mencatatkan realisasi yang sangat mendekati target, yakni masing-masing sebesar 99,15 persen (8,18 tahun) dan 93,98 persen (58,50 skor). RLS yang kini menembus angka delapan tahun menandakan peningkatan taraf pendidikan masyarakat produktif secara perlahan namun pasti, sementara fluktuasi tipis pada nilai AKM setelah mencapai puncak di tahun 2024 merupakan dinamika wajar dalam siklus asesmen nasional akibat perluasan cakupan wilayah peserta. Secara akumulatif, stabilitas kualitas pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap terjaga jauh di atas titik awal tahun 2021, memberikan fondasi kuat untuk melakukan akselerasi mutu guna mengejar ketertinggalan regional di periode perencanaan berikutnya.

Aspek yang paling membanggakan adalah konsistensi penerapan prinsip *Value for Money*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbukti mampu menuntaskan mayoritas target fisik dan infrastruktur (pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan sarana PAUD/SD/SMP) secara sempurna 100 persen, meskipun realisasi anggaran secara total hanya menyerap 85,20 persen atau senilai Rp. 347.477.398.160. Hal ini menegaskan bahwa organisasi telah berhasil melakukan efisiensi sumber daya yang signifikan tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.2 Hambatan dan Tantangan

Meskipun mencatatkan hasil yang impresif, terdapat beberapa catatan kritis yang menjadi tantangan di masa mendatang:

1. Tidak terealisasinya pengadaan Tanah (0 persen) senilai Rp. 15.406.500.000 menjadi faktor utama penahan persentase serapan anggaran total, meskipun secara teknis tidak mengganggu pembangunan fisik di lahan yang sudah tersedia.
2. Adanya penurunan statistik pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 5-6 tahun (PAUD) yang diidentifikasi bukan karena penurunan minat sekolah, melainkan akibat ketidaksinkronan basis data kependudukan (Dapodik/Emis vs SIAK).
3. Masih terdapat gap antara tingginya iklim keamanan sekolah dengan capaian literasi dan numerasi yang masih bersifat fluktuatif (baru 50 persen sekolah berkategori Baik), serta rendahnya skor pada dimensi ekonomi budaya.

4.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Untuk menjaga momentum keberhasilan dan memperbaiki kelemahan yang ada, rencana tindak lanjut untuk tahun 2026 akan difokuskan pada:

1. Membangun dashboard pemantauan real-time yang mensinkronkan data Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Disdukcapil untuk memastikan seluruh anak usia sekolah terdata secara akurat.
2. Mengalihkan fokus pelatihan guru dari sekadar pemenuhan administrasi di PMM menuju pendampingan asimetris dan supervisi kelas berbasis dampak, khususnya untuk 41 sekolah kategori "Kurang" pada rapor pendidikan.
3. Menyusun skema insentif dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku seni serta UMKM berbasis budaya untuk mendongkrak dimensi ekonomi dan ekspresi budaya dalam skor IPK.
4. Melakukan evaluasi mendalam terkait perencanaan pengadaan tanah agar kendala administratif tahun ini tidak terulang, sehingga seluruh komponen belanja modal dapat terserap proporsional dengan kebutuhan infrastruktur.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah dan anggaran yang telah dipercayakan. Semoga hasil evaluasi ini menjadi pijakan bagi perbaikan berkelanjutan demi

terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter budaya.

Akhirnya, semoga Allah 'Azza Wa Jalla meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



RONALDY PRANA PUTRA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19850416 200312 1 001